

# MASTERPLAN SMART CITY 2017 - 2021



**BUKU #2**

## MASTERPLAN SMART CITY KOTA BOGOR



**DISKOMINFOSTANDI KOTA BOGOR  
2017**

## KATA SAMBUTAN



Tingginya dinamika kehidupan sosial melahirkan harapan warga yang semakin meningkat sementara di sisi lain pemerintah kota punya banyak keterbatasan dalam hal personil, anggaran, dan sarana. Saat dihadapkan pada realita tersebut, kami yakin bahwa teknologi adalah jawabannya. Karena pada saat kita menghadapi keterbatasan, teknologi menemukan tempatnya.

Kami meyakini bahwa pada saat warga memiliki harapan untuk dilayani lebih baik, merupakan saat bagi kami untuk melayani warga dengan menggunakan perangkat teknologi. Kami percaya bahwa layanan publik bisa menjadi lebih efektif, lebih efisien dan lebih mudah ketika kita mengedepankan teknologi.

Teknologi bukan hanya sekedar efisiensi. Selain efisiensi, ada dua hal penting yang harus dibangun dan dikembangkan, yaitu teknologi untuk partisipasi dan teknologi untuk transparansi, dimana ketiganya dikedepankan dalam implementasi pembangunan smart city. Tiga hal yang menjadi target Kota Bogor, yaitu, pemerintahan menjadi lebih efisien, pemerintahan menjadi lebih transparan dan partisipasi publik yang didorong menjadi potensi enabler smart city.

Teknologi untuk efisiensi, teknologi untuk transparansi, dan teknologi untuk partisipasi. Itulah Visi kami ke depan untuk Smart City, dengan tetap bersandar kepada tiga tonggak : Bogor yang Beriman, Nyaman dan Transparan.

Bogor, November 2017

**WALI KOTA BOGOR**

**DR. BIMA ARYA**

## KATA SAMBUTAN



Kota dan masyarakat di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sulit. Lima puluh persen populasi dunia tinggal di daerah perkotaan. Hal ini diperkirakan akan meningkat hingga enam puluh persen sebelum tahun 2025. Hal ini menempatkan tekanan besar pada infrastruktur kota (transportasi, perumahan, air, listrik dan layanan kota), yang banyak memerlukan desain ulang dan belanja modal yang sangat besar.

Isu-isu ini, dan lainnya, dapat dikurangi secara cerdas melalui penerapan solusi terukur dari teknologi terdepan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas. Sebuah solusi yang dikemas dalam Smart City.

Smart City Kota Bogor dikembangkan dalam enam dimensi, yaitu dimensi smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environment.

Smart City adalah tempat di mana infrastruktur, layanan dan jaringan tradisional diperbaiki dan dibuat lebih efisien dengan bantuan teknologi TIK, memenuhi kebutuhan warganya dan bisnisnya. Mengumpulkan data dari perangkat cerdas dan sensor yang tertanam di jalan, sarana persampahan, jaringan listrik, bangunan, transportasi, infrastruktur dan lainnya dengan menggunakan perangkat lunak cerdas untuk layanan nilai tambah digital, sangat penting bagi Kota Cerdas. Dengan bersandar pada kekuatan inovasi dan upaya nyata dalam manajemen inovasi, Internet of Things (IoT) juga perlu mendapat perhatian sebagai salah satu enabler horisontal untuk aplikasi Smart City.

Bogor, November 2017

**KEPALA  
DISKOMINFOSTANDI  
Sekretaris Dewan Smart City**

**Drs. FIRDAUS, M.Si**



<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
LATAR BELAKANG.....	1
TUJUAN MASTERPLAN .....	3
LANDASAN HUKUM.....	3
KERANGKA PIKIR SMART CITY .....	4
<b>VISI SMART CITY KOTA BOGOR</b> .....	<b>17</b>
FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK VISI .....	17
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS .....	17
PRINSIP SMART CITY DI KOTA BOGOR.....	18
MENGUPAS PRIORITAS.....	19
TANTANGAN UNTUK KOTA BOGOR MENJADI KOTA CERDAS.....	19
SASARAN SMART CITY KOTA BOGOR .....	20
<b>STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY</b> .....	<b>28</b>
GAP ANALYSIS MENUJU STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY .....	28
Identifikasi Kekuatan.....	28
Identifikasi kelemahan .....	38
Identifikasi ancaman .....	40
SMART GOVERNANCE .....	40
SMART BRANDING .....	43
SMART ECONOMY .....	45
SMART LIVING .....	47
SMART SOCIETY .....	48
SMART ENVIRONMENT .....	50
<b>RENCANA AKSI SMART CITY</b> .....	<b>54</b>
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN SMART CITY .....	54
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SMART CITY .....	60
RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG SMART CITY .....	61
RENCANA PENGUATAN LITERASI SMART CITY .....	63
<b>ROAD MAP</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MANAJEMEN INOVASI</b> .....	<b>69</b>

.....	70
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>
LAMPIRAN 1 .....	70
LAMPIRAN 2 .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Elemen Smart City Readiness.....	5
Gambar 2. Dimensi Smart City .....	5
Gambar 3. Smart Governance.....	7
Gambar 4. Smart Branding .....	9
Gambar 5. Smart Economy .....	11
Gambar 6. Smart Living .....	12
Gambar 7. Smart Society.....	14
Gambar 8. Smart Environment .....	15
Gambar 9. Perbedaan Smart City dan e-Government.....	27
Gambar 10. Ekosistem Smart City dan e-Government.....	27
Gambar 11. Perkembangan CSR-PKBL di Kota Bogor dari Tahun 2012-2015.....	32
Gambar 12. Perkembangan CSR di Kota Bogor Tahun 2012-2015.....	33
Gambar 13. Grafik Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki .....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Bank berdasarkan jenis di Kota Bogor Tahun 2010-2015.....	34
Tabel 2.	Tabel Indikator Smart Governance .....	42
Tabel 3.	Tabel Indikator Smart Branding .....	44
Tabel 4.	Tabel Indikator Smart Economy.....	45
Tabel 5.	Tabel Indikator Smart Living.....	47
Tabel 6.	Tabel Indikator Smart Society .....	49
Tabel 7.	Tabel Indikator Smart Environment.....	51
Tabel 8.	Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City.....	60
Tabel 9.	Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City .....	63
Tabel 10.	Rencana Penguatan Literasi Smart City .....	63
Tabel 11.	Tabel Hasil Diskusi Kelompok Smart e-Government .....	79
Tabel 12.	Tabel Hasil Diskusi Smart Branding.....	80
Tabel 13.	Tabel Hasil Diskusi Smart Economy .....	82
Tabel 14.	Tabel Hasil Diskusi Smart Environment.....	84
Tabel 15.	Tabel Hasil Diskusi Smart Living dan Smart Society.....	85

MASTERPLAN SMART CITY DAERAH

*smart city*

KOTA BOGOR



## LATAR BELAKANG

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Bogor dari tahun ke tahun dalam skala 1,7% s.d 2,3% per tahun, terbatasnya luasan wilayah kota, kesenjangan sosial, kemacetan, kemiskinan, berkembangnya masalah kesehatan dan terbatasnya sumber daya alam menjadikan pengelolaan kota menjadi semakin kompleks. Kondisi tersebut secara empirik menimbulkan berbagai persoalan yang menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki, mencari solusi terbaik serta meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Konsep *smart city* (kota cerdas) yang menjadi isu besar di kota-kota besar di seluruh dunia secara global telah menstimulan kota-kota di dunia untuk mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota dengan pendekatan menggeser pola pemerintahannya menjadi *citizen centric* dan *stakeholders centric* sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara penyedia layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dengan warga kota. Pola tersebut melahirkan Interaksi dua arah yang akan terus berkembang dan berproses sehingga nantinya kota akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali serta tangguh dalam merespon perubahan dan tantangan yang baru dengan lebih cepat.

Tren pembangunan smart city begitu cepat menyebar ke seluruh belahan dunia, bukan hanya di negara-negara maju, tren pembangunan smart city telah mempengaruhi cara berpikir dan semangat dari para decision maker baik di negara berkembang, maupun negara-negara under development. Barcelona, Amsterdam, Tokyo, Mumbai, Seoul, Melbourne, Shanghai, Dubai, Singapura, dan lain-lain telah memiliki kisahnya sendiri-sendiri dalam pembangunan dan pengembangan smart city di kotanya. Semuanya mampu menjadi contoh dan memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah smart city bertindak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya.

Kota Bogor sebagai *hinterland city* atau kota penyangga dari Ibukota negara pun mengalami fase yang sama dengan kota-kota lain di dunia. Permasalahan muncul tiada henti, silih berganti, mengambil dan merubah bentuknya mengikuti perkembangan jaman. Sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, menjamin keselamatan warga, dan memberikan kehidupan yang berkualitas kepada setiap penduduk di dalamnya. Pemerintah Kota Bogor pun terus berusaha untuk selalu berjalan bersandingan dengan perubahan jaman.

Konsep smart city yang dinamis dan memfokuskan diri pada inovasi, solusi dan pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi secara optimal

menjadi pilihan yang tidak dapat terelakkan. Gerakan digitalisasi dan komputasi mulai bergerak sejak tahun 2004 dan mulai mempercepatlangkahnya di tahun 2012. Namun, perubahan yang signifikan dalam pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bogor baru benar-benar terasa di tahun 2015 dengan mengusung semangat dan tema e-Government.

Pada tahun itu, terjadi booming teknologi informatika dan komunikasi (TIK) pada beberapa perangkat daerah di Kota Bogor. Setiap perangkat daerah mulai melakukan redefinisi pelayanan publik yang menjadi kewenangannya masing-masing. Ide-ide, inovasi, kreativitas untuk menjadi lebih baik berupaya diwujudkan dan dilaksanakan. Sayangnya, perkembangan TIK dalam sistem kewenangan tersebut bersifat sporadis, parsial dan sektoral, tanpa standar dan guidance. Banyaknya aplikasi ICT yang dibangun pada akhirnya menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam hal integrasi aplikasi, integrasi sistem, integrasi data, dan interoperabilitas data.

Dalam rangka penjaminan pencapaian rencana pembangunan e-Government, maka dibentuklah Tim Pecepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Kota Bogor (TP4) berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2014 yang fokus kepada peningkatan kualitas pelayanan publik, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai target-target pembangunan terutama terkait dengan penyelesaian isu-isu strategis dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Selain itu, untuk memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan dan pembangunan e-Government berbasis TIK, maka disusunlah dokumen Perencanaan Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Bogor 2014-2018.

Dokumen Rencana Induk e-Government Kota Bogor bertujuan untuk memberikan arahan yang lebih nyata dan terukur serta realistis untuk dapat diselesaikan dari setiap kegiatan di Kota Bogor yang menggunakan teknologi informasi. Selain itu penyusunan Rencana Induk e-Government Kota Bogor ini dapat memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan e-government Pemerintah Kota Bogor yang komprehensif, efisien, efektif dan terpadu menuju Good Corporate Governance dan tetap berada dalam kerangka dan bagian dari penerapan TIK di lingkungan Kota Bogor.

Namun demikian, nomenklatur smart city belum muncul baik sebagai subjek maupun objek ataupun wacana dalam dokumen rencana induk tersebut. Dengan demikian, tentunya dimensi-dimensi smart city yang terdiri dari smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment, belum dijabarkan dengan lebih terperinci beserta indikator/tolok ukurnya masing-masing.

Oleh karena itu, sejalan dengan program kerja Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia dari Kementerian Kominfo RI. Pada tahun 2017, Gerakan Menuju 100 Smart City memilih 25 Kabupaten/Kota untuk difasilitasi dan didampingi dalam menyusun Masterplan Smart City serta merencanakan dan melaksanakan program Quick Win Smart City. Masterplan ini diharapkan akan menjadi panduan daerah dalam melakukan implementasi pembangunan berbasis smart city dalam jangka waktu 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan yang akan direview setelah 5 (lima) tahun pertama dilaksanakan atau secara periodik sesuai kebutuhan.

## **TUJUAN MASTERPLAN**

Masterplan Smart City merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan smart city yang berupa inisiatif-inisiatif program beserta peta jalannya (road map). Inisiatif smart city dibuat berdasarkan permasalahan yang muncul di Kota Bogor, sehingga menghasilkan inisiatif yang memberikan solusi yang secara umum bertujuan ingin meningkatkan (1) kualitas hidup masyarakat, (2) meningkatkan ekonomi masyarakat dan (3) meningkatkan keberlangsungan lingkungan hidup dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu a) pendekatan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi, b) pendekatan pemberdayaan potensi kota, serta c) pendekatan pemberdayaan manusia yang berkesinambungan.

Inisiatif-inisiatif yang dimuat dalam Masterplan Smart City ini dibuat berdasarkan data permasalahan di daerah yang telah disederhanakan, sehingga inisiatif yang diciptakan bersifat solusi dan memiliki peluang besar untuk diimplementasikan.

## **LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E)
12. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia.

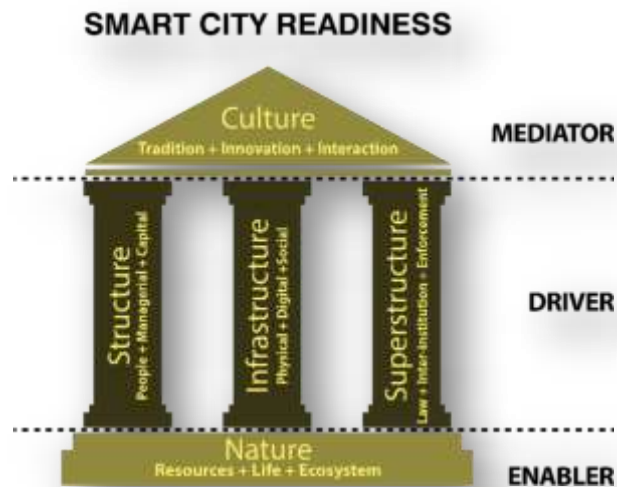
### **KERANGKA PIKIR SMART CITY**

Kerangka pikir (*frameworks*) Smart City (Kota Cerdas) dalam Masterplan Smart City ini disesuaikan dengan kerangka pikir yang telah dipaparkan dalam Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2017 – Gerakan Menuju 100 Smart City yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2017.

Istilah lain dari Smart City yang digunakan oleh Kota Bogor adalah Kota Cerdas. Dalam upayanya membangun Smart City, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melalui surat Nomor: 265 Kominfo/DJAI/AI.01.05/05/2017 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Assessment Gerakan Menuju 100 Smart City menilai Kota Bogor telah memiliki Kesiapan Daerah Cerdas atau *Smart City Readiness*.

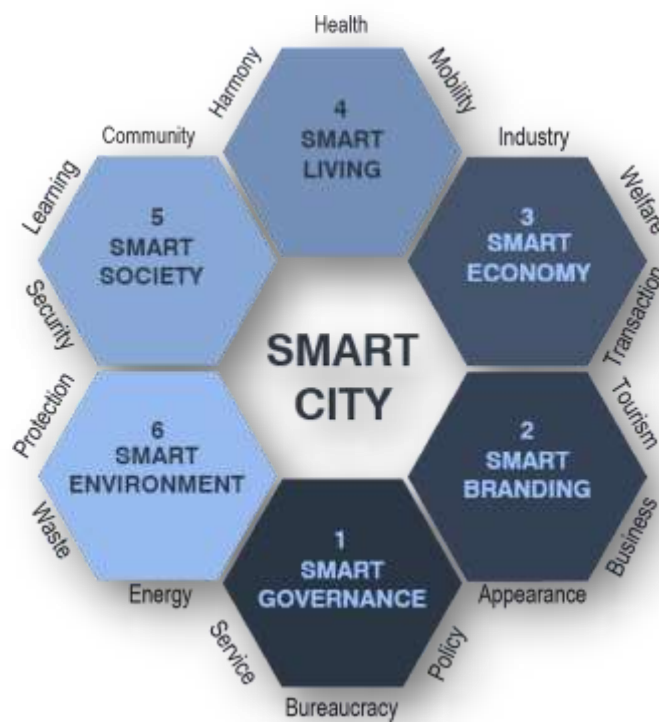
Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah cerdas, yaitu potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian *Smart City Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah cerdas tersebut dapat dilihat pada Gambar II. 1.

- **Struktur**; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat Smart City, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- **Infrastruktur**; pembangunan infrastruktur pendukung Smart City yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur sosial untuk kepentingan umum;
- **Suprastruktur**; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan Smart City.



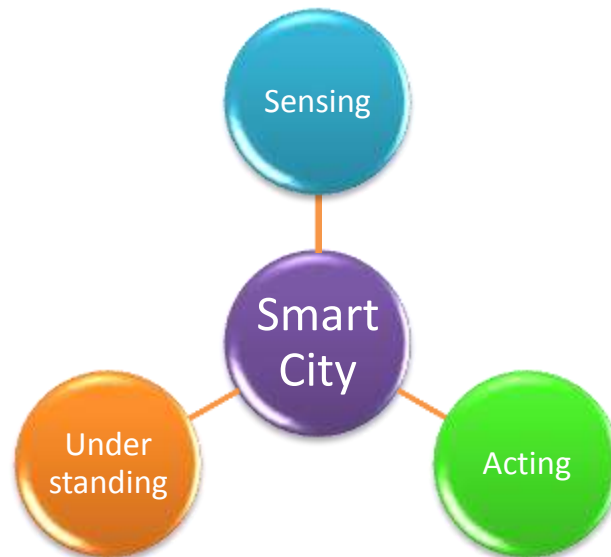
Gambar 1. Elemen Smart City Readiness  
 Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah Smart City adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam Smart City itu sendiri.



Gambar 2. Dimensi Smart City  
 Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

Smart city sebagai bentuk pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi tentunya harus melalui proses pemetaan (sensing), memahami (understanding) dan eksekusi yang efisien dan efektif (acting). Tentunya didampingi oleh mekanisme controlling yang baik, efisien dan efektif. Berikut adalah kerangka keterkaitan antara dimensi, area kerja dan indikator dari tiap dimensi sebagaimana gambar di atas.

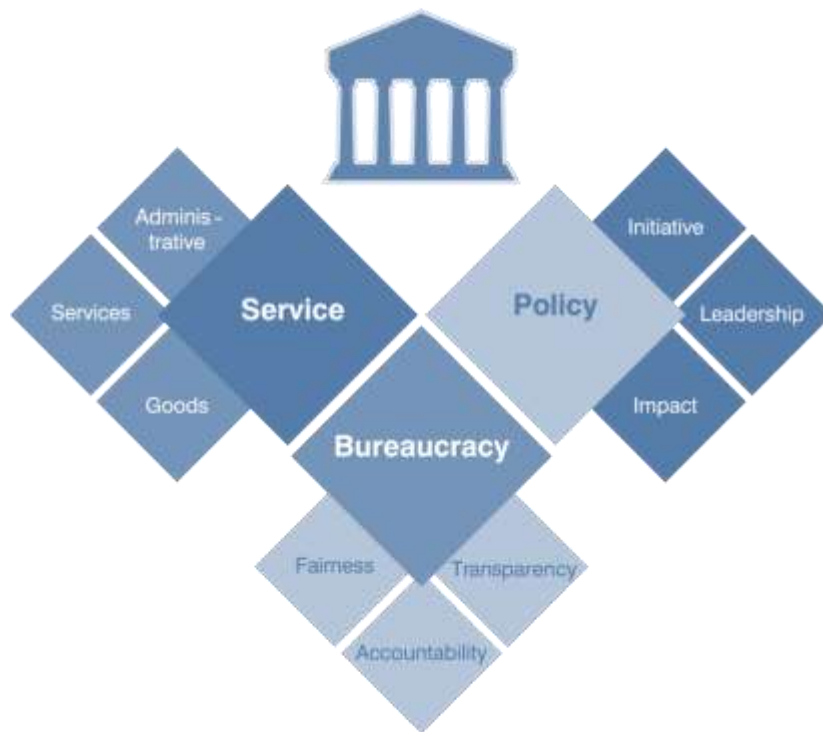


## 1. Smart Governance

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang cerdas, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga Smart Governance di dalam dimensi Smart City merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

# SMART GOVERNANCE



Gambar 3. Smart Governance  
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Tentu saja dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. Smart Governance harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*). Inisiatif pembangunan Smart Governance dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

## a. Pelayanan Publik (Public Service)

- Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik,

internet, dan lain-lain.

#### **b. Manajemen Birokrasi Yang Efisien (Bureaucracy)**

- Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (*fairness*), bertanggung-jawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*).

**Misalnya:** sistem e-planning, e-budgeting, e-monev dan lain-lain. Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju *integrated & inter-operability e-gov* atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e-Gov. Pelayanan Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah "City Operation Center (COC)".

#### **c. Efisiensi Kebijakan Publik (Public Policy)**

- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

## **2. Smart Branding**

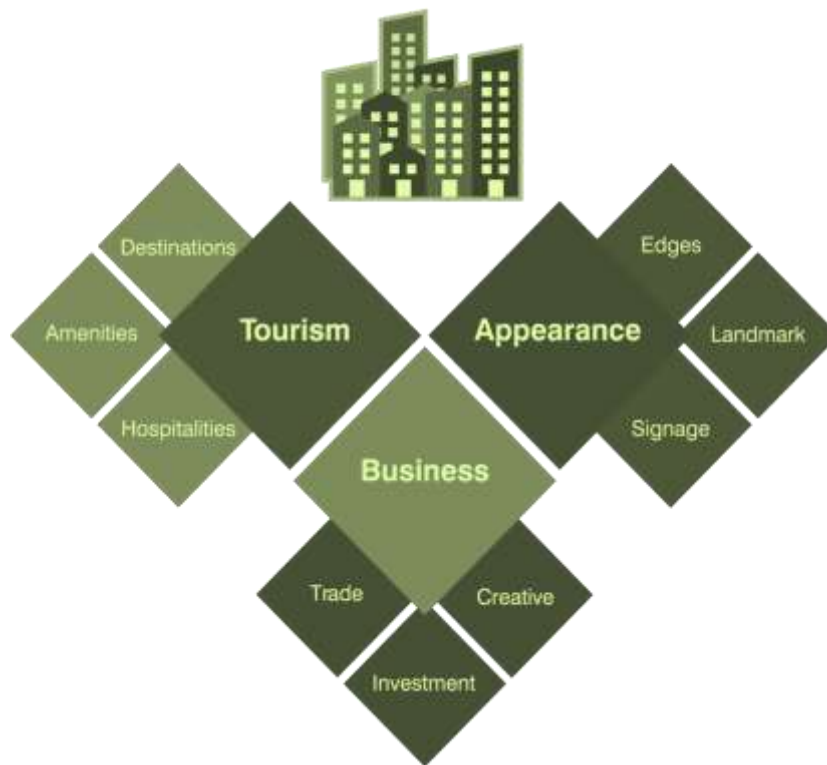
Dimensi kedua dalam Smart City adalah Smart Branding, yaitu branding daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

Smart Branding menjadi salah satu dimensi dalam Smart City karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.

Sehingga pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi tujuannya adalah meningkatkan *brand value* perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan, pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



# SMART BRANDING



Gambar 4. Smart Branding  
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari smart branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Inisiatif pembangunan Smart Branding dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

**a. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)**

- Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (*destination*).
- Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (*amenities*) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/bedding & breakfast (B&B), restoran, dan lainlain.
- Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (*hospitality*) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain.

**b. Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)**

- Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya market place daerah.

- Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya Investment Lounge, Dashboard, dan Portal Investasi Daerah.
- Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, fashion, digital, dan lain-lain.

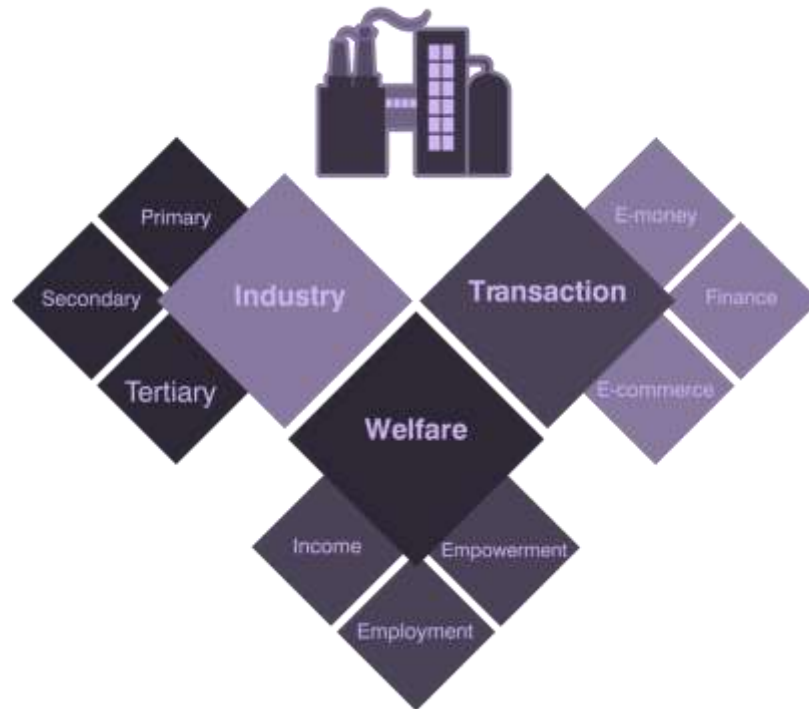
**c. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)**

- Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.
- Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.

**3. Smart Economy**

Dimensi ketiga dalam Smart City adalah smart economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. Smart economy dalam dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.

# SMART ECONOMY



Gambar 5. Smart Economy  
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari dimensi smart economy di dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam smart economy, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. Inisiatif pembangunan Smart Economy dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

**a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*industry*)**

- Membangun daya saing industri daerah pada *leading sector* industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lainlain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, *packaging* dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).

**b. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)**

- Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*)
- Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*)

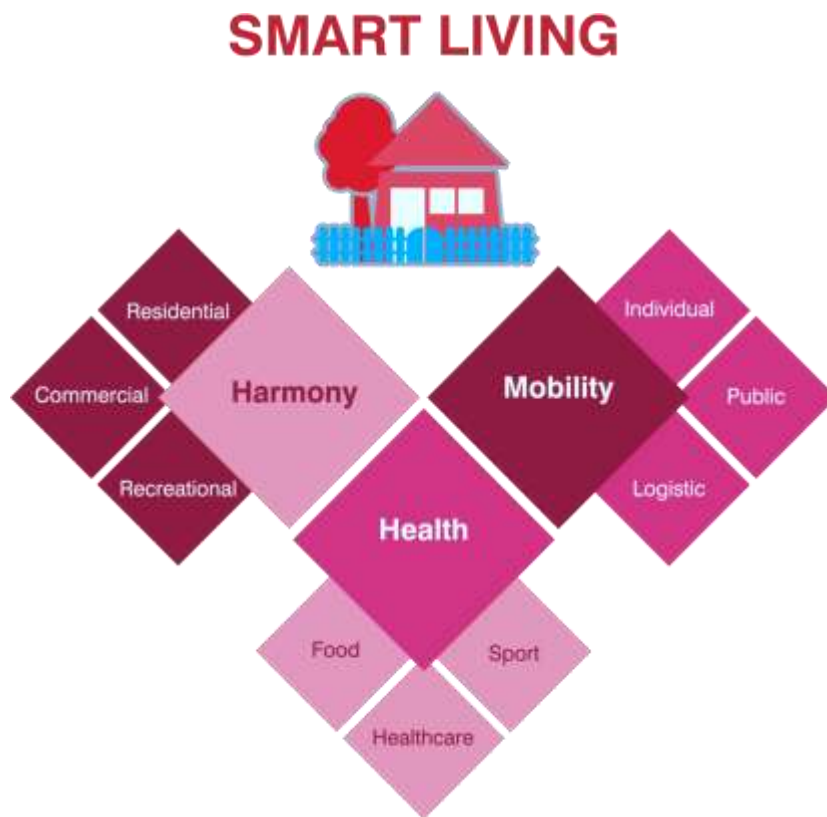
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*).

**c. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)**

- Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang *less cash*
- Mewujudkan masyarakat yang *bankable* dan memiliki akses terhadap permodalan
- Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri e-commerce dan market place.

**4. Smart Living**

Smart living menjadi salah satu dimensi dalam Smart City untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City.



**Gambar 6. Smart Living**  
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari smart living di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Inisiatif pembangunan Smart Living dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

**a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)**

- Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*).

**b. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)**

- Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (*healthcare*), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*).

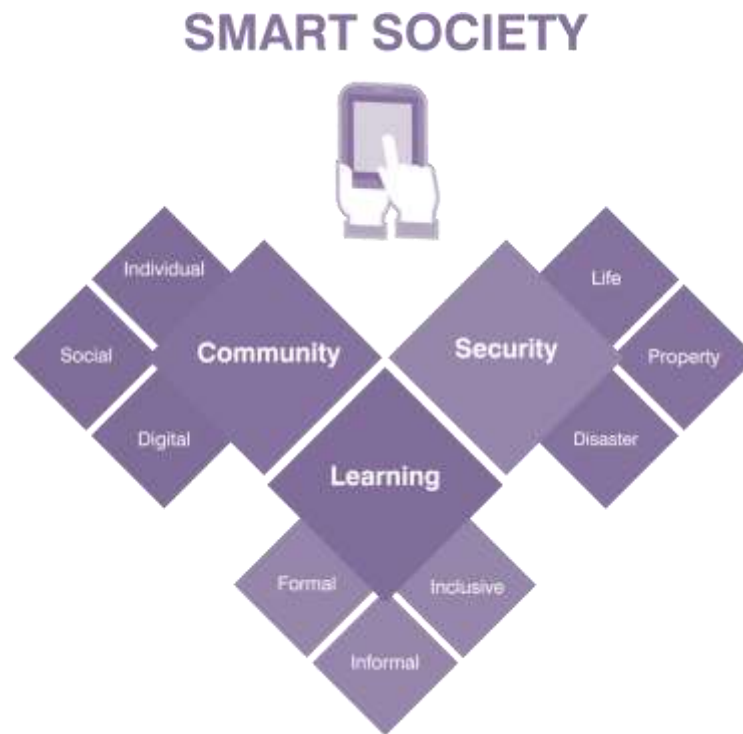
**c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)**

- Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (*mobility*) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

5. **Smart Society**

Smart society sebagai bagian dari Smart City merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah Smart City, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Sasaran dari smart society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari smart society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam smart society, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*). Inisiatif pembangunan Smart Society dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:



**Gambar 7. Smart Society**  
**Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)**

**a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (*Community*)**

- Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan Smart City misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain.
- Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang market place dan lain-lain.

**b. Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (*Learning*)**

- Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang *disable*.
- Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya *smart school*, *smart campus*, *smart pesantren*, *smart training program* dan lain-lain.

**c. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)**

- Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan

bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau *Internet of Thing (IoT)*.

## 6. Smart Environment

Dimensi keenam dalam sebuah Smart City adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari smart environment di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Smart City yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.



Gambar 8. Smart Environment

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari smart environment adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

### a. Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (*Protection*)

- Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air,

dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada *Internet of Thing (IoT)*.

- Membangun ruang terbuka hijau
- Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi
- Mengendalikan polusi udara

**b. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)**

- Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (*household*)
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (*industrial*)
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (*public*)
- Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.

**c. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (*Energy*)**

- Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggung jawab
- Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.



MASTERPLAN SMART CITY DAERAH

*smart city*

**KOTA BOGOR**

## FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK VISI

Memperhatikan RPJP dan RPJMD Kota Bogor, pada dasarnya Kota Bogor telah memiliki visi tentang bagaimana, kapan, dan seperti apa Kota Bogor akan menjadi Kota Cerdas. Cita-cita Kota Bogor pada tahun 2024 adalah mampu mewujudkan Kota Bogor sebagai kota jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan amanah. Upaya tersebut tentunya dibangun dengan komitmen dan percepatan pembangunan diberbagai bidang. Pemaknaan cita-cita tersebut tentunya memerlukan kemauan yang keras, keseriusan, komitmen terhadap misi serta kesiapan mempertanggungjawabkan apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Saat ini Kota Bogor berada pada masa pembangunan 5 (lima) tahun kedua (2015-1019) dengan visinya “Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan”. Dari keseluruhan 6 (enam) misi, misi pertama “menjadikan Bogor Kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi” sangat mendukung seluruh stakeholder di Kota Bogor untuk berevolusi ke arah pembangunan Kota Bogor sCerdas (*Bogor Smart City*). Misi tersebut secara nyata dan implementatif menggambarkan visi Kota Bogor dalam membangun smart city di masa depan menjadi Kota Cerdas Berwawasan TIK Yang Nyaman, Beriman dan Transparan.

## PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Dinamika masyarakat saat ini begitu intens dengan tingkat kepentingan yang sangat beragam. Harapan dari warga semakin meningkat sementara di sisi lain pemerintah kota punya banyak keterbatasan dalam hal personil, anggaran, dan peralatan. Keterbatasan tersebut sangat mempengaruhi bagaimana kemampuan Kota Bogor memberikan pelayanan kepada seluruh warga.

Diyakini bahwa dimana warga memiliki harapan (untuk) dilayani lebih baik, maka saat tersebut adalah saat yang paling tepat bagi pemerintah untuk melayani warga dengan menggunakan perangkat teknologi. Karena dengan mengedepankan dan menggunakan perangkat teknologi yang tepat, dipercaya bahwa layanan publik bisa menjadi lebih efektif, lebih efisien dan lebih mudah.

Pemanfaatan teknologi bukan hanya sekedar untuk mengejar efisiensi, tapi ada dua point lagi selain efisiensi, yaitu teknologi untuk partisipasi dan teknologi untuk transparansi. Teknologi, baik teknologi secara umum maupun teknologi di

bidang informatika dan komunikasi mencoba untuk mengimplementasikan smart city secara bertahap di Kota Bogor. Tiga hal yang menjadi target pemerintah Kota Bogor adalah pemerintah menjadi lebih efisien, yang kedua pemerintahan lebih transparan karena publik akan relatif lebih mudah mengakses berbagai macam informasi, dan yang ketiga, partisipasi publik juga bisa didorong lebih baik lagi.

Ada 3 (tiga) tonggak dalam penetapan visi smart city Kota Bogor, yaitu : Bogor yang Beriman, Nyaman dan Transparan.

Beriman itu konteksnya vertikal, kehidupan religius transendental. Tapi ketika berbicara nyaman dan transparan, disinilah peran smart city. Kota ini akan lebih nyaman kalau kita kedepankan teknologi. Kota ini juga akan lebih transparan jika kita terapkan teknologi. Lebih mengait betul dengan visi kita yang nyaman, beriman dan transparan. Terutama yang nyaman dan transparan.

### **PRINSIP SMART CITY DI KOTA BOGOR**

Prinsip-prinsip smart city di Kota Bogor sudah mulai ada sejak era e-government. Diantaranya adalah prinsip-prinsip mengurangi paper works (kertas), prinsip untuk mencoba mengintegrasikan semua aplikasi, dan prinsip untuk memudahkan warga menyampaikan aspirasi.

Terkait prinsip terakhir (aspirasi warga) tonggaknya adalah ketika Kota Bogor mendapatkan award kedua dari IDSA tahun 2014. Saat itu Kota Bogor diundang sebagai finalis. Setelah dipelajari, hal tersebut bisa mejadi guideline bagi Kota Bogor untuk membangun smart city. Karena IDSA (Indonesian Digital Society Award) melihat dari kesiapan infrastruktur dan kesiapan dari warga. IDSA lebih kepada penilaian terhadap gagasan Kota Bogor, tentang inovasi yang digagas dan dikembangkan, bukan penilaian tentang smart city. Itulah tonggak yang mendorong Kota Bogor untuk konsisten walaupun pada kenyataannya konsisten dan fokus adalah hal yang tidak mudah.

Menjadi tidak mudah karena smart city di satu sisi dapat menjelma menjadi rimba belantara. Jika Kota Bogor tidak punya pegangan, tidak punya TOR (Term of refference), bisa tersesat. Dalam setiap perumusan kebutuhan, harus selalu diterapkan prinsip yang pertama adalah “mana/apa dulu”, yang kedua “memakai apa”, dan yang ketiga terkait dengan “alokasi anggaran,” Mengingat semua hal tersebut memerlukan anggaran, sementara kondisi APBD Kota Bogor belum bisa untuk mengkondisikan (smart city) secara maksimal. Kota Bogor harus giat untuk keluar mencari dukungan, baik dari program-program kementerian, CSR (Corporate Sosial Responsibility) pihak swasta, maupun dari partisipasi masyarakat lainnya.

## **MENGUPAS PRIORITAS**

Penetapan prioritas menjadi salahsatu kunci sukses pembangunan smart city. Salahsatu metode cerdas dan kritis dalam penetapan prioritas adalah melalui proses brainstorming dengan banyak pihak, seperti perguruan tinggi, sektor privat, kelompok masyarakat peduli, juga lembaga pemerintahan terkait.

Point pertama, “smart city is not just cctv”, karena banyak yang menafsirkan seperti itu, melainkan jauh lebih kompleks dan dinamis dari hanya sekedar cctv.

Point kedua, smart city harus sesuai dengan kebutuhan kota bogor yang ingin dikedepankan dengan baik dikaitkan dengan karakteristik masing-masing daerah, dikaitkan juga dengan program prioritas kota bogor.

Point ketiga, smart city fokus kepada aspek yang dapat menjadi PRIME MOVER atau pioneer yang mendorong sektor-sektor lain untuk bisa bergerak dalam bidang reformasi birokrasi.

## **TANTANGAN UNTUK KOTA BOGOR MENJADI KOTA CERDAS**

Tantangan yang utama adalah dalam menyusun suatu sistem (sumber daya manusia) yang kompatibel yang bisa menyesuaikan. Misalkan jika Kepala Diskominfostandi Kota Bogor pindah, sudah ada sistemnya dan kadernya, atau bagaimana kita memposisikan diri dalam hubungan dengan pihak ketiga, dengan konsultan, komunitas dan kampus yang terus menyambung (terhubung). Jika tidak, dikhawatirkan akan ada kemunduran. Jadi tantangan utama adalah di bidang SDM (sumber daya manusia), tentang bagaimana Kota Bogor dengan kondisi seperti ini (keterbatasan) tetap bisa konsisten berjalan (membangun smart city).

Tantangan kedua adalah anggaran. Dari sisi pemerintah, dukungan legislatif amat penting, dari sisi warga pun sama, *smart city need smart people* (kota cerdas membutuhkan warga yang cerdas) yaitu orang-orang yang bisa menggunakan layanan ini dengan baik. Tingkat melek teknologi warga kota bogor sudah sangat baik, literasi internet pun sudah sangat baik. Tetapi, kebiasaan mereka untuk menggunakan teknologi untuk layanan publik masih harus terus dilakukan proses edukasi.

Terkadang, banyak informasi terkini (hal-hal yang dimiliki pemerintah) sangat sulit untuk sampai kepada mereka, banyak yang belum warga ketahui, walaupun masyarakat mengetahui, baru mereka ketahui belakangan. Seperti contohnya layanan yang seharusnya populer, yaitu 112, ternyata belum didukung oleh kesiapan society-nya, dalam artian, banyak sekali distorsi, gangguan, laporan palsu dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi setiap harinya. Hal tersebut memberikan kesadaran kepada pemerintah Kota Bogor bahwa kultur harus dibangun dengan infrastruktur. Artinya, seharusnya ada teknologi untuk menangkal gangguan-

gangguan terhadap aplikasi sistem elektronik yang ada (termasuk hoax dan oknum nakal kepada NTPD 112). Ini tantangan bagi Kota Bogor untuk terus berinovasi.

Semangat tersebut dituangkan dalam strategi khusus pencapaian smart city dalam 4 (empat) paradigma :

1. Gagasan, konsep atau ide. Itulah relevansi dari master plan. Driven by idea (diarahkan oleh ide-ide) yang jelas.
2. Payung hukum. Contohnya untuk jaringan infrastruktur, kita membutuhkan perda atau perwali yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan transportasi jaringan. Contohnya microcell.
3. Sumber daya manusia (SDM). SDM yang terus ditingkatkan pemahaman teknisnya dan pengembangan SDM TIK yang kompeten.
4. Smart city pada dasarnya meminimalkan intervensi manusia, mengedepankan peran teknologi. Dengan asumsi intervensi manusia itu tidak bisa membebaskan faktor-faktor kepentingan. Ketika semua dikembalikan ke teknologi, jadi lebih transparan.
5. Penyediaan infrastruktur TIK yang baik, handal dan memenuhi kebutuhan di masa depan.
6. Pembangunan dan pengembangan aplikasi layanan yang berorientasi kepada manfaat dan memberi dampak positif yang luas.

Dari sejarah terbentuknya Kota Bogor, kondisi historis dan psikologis Kota Bogor serta 4 (empat) faktor tersebut, maka disusunlah visi smart city Kota Bogor sebagai berikut : **Kota Pusaka Cerdas Yang Efisien, Transparan, dan Partisipatif.**

#### **SASARAN SMART CITY KOTA BOGOR**

Dari kerangka pikir smart city yang implementatif pada bab sebelumnya, yang menjadi sasaran dalam pembangunan smart city di Kota Bogor sebagai upaya mewujudkan Kota Bogor Cerdas adalah dengan mendefinisikan Kota Bogor Cerdas sesuai dengan potensi yang telah dipetakan dalam Buku #1 Analisis Strategis Smart City Kota Bogor ke dalam 6 (enam) dimensi, yaitu :

1. Smart Governance
2. Smart Branding
3. Smart Economy
4. Smart Living
5. Smart Society
6. Smart Environment

## Smart Governance

Smart Governance adalah tata kelola kota yang cerdas, yang menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

SMART GOVERNANCE	
SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat Online Terintegrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Persentase inovasi masyarakat yang berhasil diimplementasikan untuk menunjang visi misi Kota Bogor
Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
	Persentase Publikasi Kinerja Perangkat Daerah
	Implementasi e-government
Meningkatnya Keterlibatan Publik Dalam Manajemen Kebijakan Publik	Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan
	Persentase Masyarakat Yang Mengakses Website Kota Bogor

## Smart Branding

Branding daerah yang cerdas adalah inovasi dalam memasarkan Kota Bogor sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Bukan saja dengan memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan di Kota Bogor.

SMART BRANDING	
SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Berkembangnya Ekosistem Pariwisata	Persentase Penanda Unik Destinasi wisata
	Persentase Pengembangan Kampung Kreatif
Berkembangnya Ekonomi Kreatif Daerah	Pembangunan Bogor e-commerce
	Persentase Pemberdayaan Pemuda Wirausaha
	Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif
Terciptanya Wajah Kota Dengan Tata Ruang Yang Berkualitas	Persentase Taman Kota Tematik Yang Berkualitas
	Persentase Preservasi Bangunan Kota Pusaka
	Persentase Tersedianya Navigasi Unik Kota Bogor Berbasis Aplikasi, Virtual dan atau Augmented

### Smart Economy

Tata kelola perekonomian yang cerdas dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Sasaran dari dimensi smart economy di dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Pasar pun tidak luput dari perhatian.

Seluruh stakeholder harus duduk bersama untuk merumuskan strategi pertumbuhan tentang pengembangan pasar yang tematik dan pasar dengan pendekatan baru, pengembangan pasar geografis baru, segmen demografis atau psikografis baru, ataupun benar-benar pengguna baru.

SMART ECONOMY	
SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Pelayanan Berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pajak Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Perijinan
	Meningkatnya Jumlah Wisata Kuliner
	Tingkat Okupansi Kios Pada 5 Pasar Besar
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Angka Kemiskinan
	Angka Kesempatan Kerja
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Transaksi “Tidak Tunai” Berbasis Perbankan
	Persentase Transaksi Berbasis Uang Elektronik

### Smart Living

Smart living bertujuan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City. Sasaran dari smart living di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

SMART LIVING	
SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terkendalinya Tata Ruang Kota Bogor	Rencana Tata Ruang Wilayah
	Rencana Detail Tata Ruang
	Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
	Persentase konsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan RPJMD
Meningkatnya Layanan Kesehatan	Persentase Penggunaan SIMPUS



	Persentase Penggunaan Layanan Kesehatan Berbasis Web
	Persentase Penggunaan Layanan Rujukan elektronik (e-SIR)
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum, Prasarana dan Sarana Transportasi	Persentase Konversi Angkutan Umum berbasis Minibus ke Bis Kecil
	Persentase Pembangunan Jalan R3
	Persentase Pembangunan Jalan Bogor Inner Ring Road
	Persentase Angkutan Umum yang Konversi dari BBM ke BBG
	Persentase Penggunaan e-Money
	Persentase Pedestrian Yang Berkualitas dan Pro Disabilitas

### Smart Society

Smart society menempatkan manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Smart City berusaha mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

SMART SOCIETY	
SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meingkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kepeloporan, Kewirausahaan, Jambore Pemuda dan Jambore Komunitas
	Tingkat Partisipasi Pelajar Dalam Seleksi Paskibraka
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Event Sosial, Olahraga, Seni dan

	Budaya
Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang T.I.K	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Yang Menyelenggarakan e-Learning
	Jumlah Kegiatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Dengan Stakeholders Relawan TIK
Meningkatnya Layanan Kebencanaan	Persentase Kelurahan Siaga Bencana
	Persentase penanganan bencana yang sesuai dengan waktu tanggap
	Jumlah Sosialisasi Mitigasi Cerdas Kebencanaan
	Jumlah Pengaduan Melalui Nomor Tunggal Panggilan Darurat

### Smart Environment

Pengelolaan lingkungan yang cerdas memberikan perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Smart City yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

SMART ENVIRONMENT	
SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Proteksi Terhadap Lingkungan Hidup	Persentase Ruang Terbuka Hijau
	Indeks Kualitas Udara Dan Air Sungai
	Cakupan Kawasan Lindung
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Berbasis Masyarakat	Volume Sampah Terangkut Ke TPA
	Persentase Reduksi Sampah Rumah Tangga
	Persentase Layanan Air Limbah Bagi

	Masyarakat Yang Tidak Memiliki Saluran Air Limbah
Terciptanya Tata Kelola Energi Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Penggunaan BBG
	Persentase Penggunaan Bio Diesel
	Terbangunnya Pembangkit Listrik Bertenaga Sampah
	Terbangunnya Stasiun Hidrologi Listrik Skala Kecil (Mikrohidro)
	Persentase Penggunaan Tenaga Surya Pada Utilitas Publik

### Perbedaan e-Government dan Smart City

Langkah selanjutnya adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada seluruh komponen kota tentang perbedaan dari e-Government dan Smart City. Untuk dapat memahaminya, Prof. Suhono dkk dari Smart City & Community Innovation Center, Institut Teknologi Bandung dalam paparannya yang berjudul Smart City Untuk Indonesia, secara ringkas menggambarkan bahwa Smart City memiliki ruang lingkup yang jauh lebih besar, dimana e-Government merupakan bagian dari pembangunan dan pengembangan smart city.

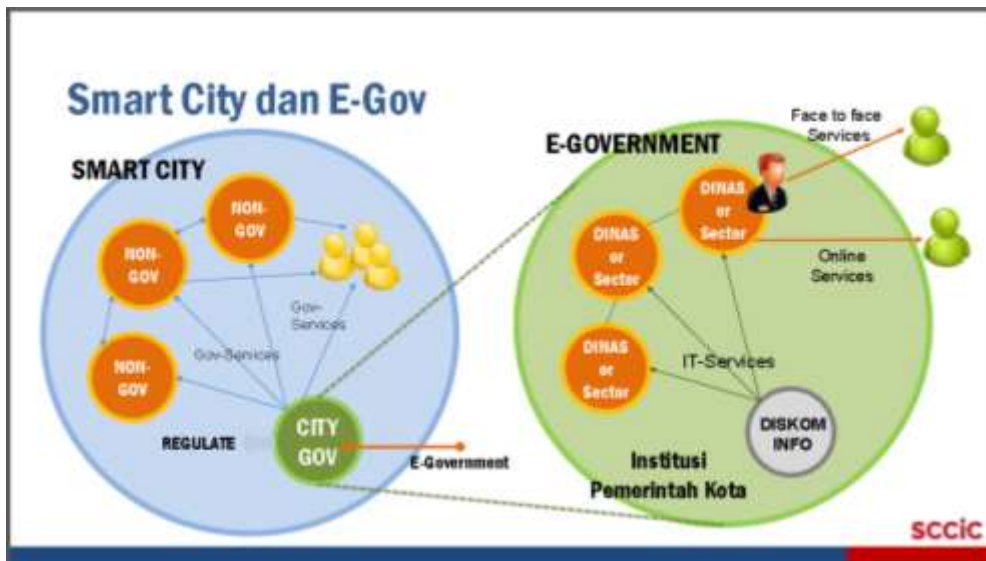
E-Government secara entitas bersifat internal Pemerintahan yang diselenggarakan secara internal oleh para penyelenggara pemerintahan, baik lembaga maupun aparatur. Sedangkan smart city, mencakup berbagai entitas yang ada dalam sebuah kota/daerah yang mencakup entitas masyarakat (citizen), entitas pelaku usaha, entitas pemerhati dan pelaku smart city, entitas organisasi non pemerintah (non government organization / NGO) atau dengan kata lain melibatkan keseluruhan kota. Perbedaan tersebut digambarkan sebagaimana ilustrasi di bawah ini.

## SMART CITY & e-GOVERNMENT

E-Government	Smart City
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Main Objective: Better public services, Better Internal Management in Government Institution</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Main Objective: Better City</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coverage: <b>Government institution</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coverage: <b>The whole City</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Span of control: fully controlled</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Span of control: not fully controlled by Government</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Customer: Citizen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Customer: Citizen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiatives &amp; Implementation: Government</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiatives &amp; Implementation: Government and Non-Government</li> </ul>

**sccic**

Gambar 9. Perbedaan Smart City dan e-Government



Gambar 10. Ekosistem Smart City dan e-Government

Sertiap langkah perencanaan dan eksekusi rencana dari masterplan smart city ini secara estafet mengikuti teori Input Proses dan Output untuk menciptakan Outcome yang diharapkan. Langkah strategis haruslah terukur, jelas tahapan, definisi yang jelas tentang input, jelas output, arahan yang jelas tentang siapa berbuat apa, sistem koordinasi yang efektif dan efisien. Walaupun setiap entitas memiliki sumber daya yang bervariasi, latar belakang dan area kerja yang berbeda, namun tetap harus memiliki kesamaan visi.

MASTERPLAN SMART CITY DAERAH

*smart city*

**KOTA BOGOR**

## **GAP ANALYSIS MENUJU STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY**

### **Identifikasi Kekuatan**

#### **Kekuatan Sektor Pemerintah**

Kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor dalam upaya perwujudan Bogor Smart City dapat dipetakan dalam beberapa bidang sebagai berikut :

1. Kebijakan :
  - 1) Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah direvisi terakhir pada tahun 2017.
  - 2) Strategi penerapan kebijakan e-Government sebagai modal dasar pencapaian Bogor Smart City yang telah dituangkan dalam buku Perencanaan Induk Pengembangan e-Government Kota Bogor Tahun 2014-2019.
  - 3) Kepala Daerah memiliki e-Leadership yang kuat yang mampu mendorong aparatur dan unit kerja untuk melakukan inovasi pelayanan publik.
  
2. Kelembagaan :
  - 1) Dikembangkannya unit kerja Kantor Kominfo menjadi Dinas Komunikasi, Informasi, Statistika dan Persandian tipe A.
  - 2) Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta uraian jabatan aparatur.
  - 3) Telah terbentuknya Dewan Smart City Kota Bogor yang diketuai oleh Walikota dan Tim Pelaksana Smart City Kota Bogor yang diketuai oleh Kepala Diskominfostandi.
  
3. Infrastruktur (sarana dan prasarana) teknologi informasi dan komunikasi (TIK) :
  - 1) Sudah tersedia jaringan 3G/4G di seluruh Kota Bogor dengan jangkauan akses sangat bagus.
  - 2) Seluruh Perangkat Daerah di Kota Bogor sudah terhubung menggunakan 6 (enam) BTS backbone jaringan Fiber Optic (FO) dengan akses internet terpusat di Diskominfostandi yang didistribusikan ke 128 titik dimana 69

titik sudah tersambung FO. Sedangkan dari 68 Kelurahan, 31 kelurahan terhubung menggunakan FO sedangkan 37 kelurahan lain masih menggunakan wireless.

- 3) Kapasitas Bandwith jaringan akses di tahun 2017 sebesar 500 MBPS Dedicated.
- 4) Data center sudah tersedia (15 server) meskipun belum memenuhi standar dan belum mampu menjadi Data Recovery Center (DRC).
- 5) Hot spot untuk publik di beberapa fasilitas publik yang menjadi aset Pemerintah Kota Bogor di tahun 2017 sebanyak 35 titik.
- 6) CCTV yang terpasang sebanyak 58 unit di luar Balaikota Bogor (termasuk di dalamnya CCTV untuk kepentingan Area Traffic Control System (ATCS) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, dan 40 unit terpasang di seputaran Balaikota Bogor.
- 7) Sistem pendukung supply listrik menggunakan catu daya tambahan berbasis UPS (uninterruptible power supply).

4. Aplikasi :

Layana publik yang telah menggunakan Aplikasi TIK berbasis web (internet) secara online dan aktif ada dalam fungsi pelayanan :

- 1) Pelayanan eksternal kepada publik :
  - a. Payment Online Service System (POSS) Pajak Bumi dan Bangunan
  - b. BPHTB online
  - c. Report Penyampaian SPPT PBB
  - d. SIPDEH (sistem informasi pelayanan e-SPTPD)
  - e. Perijinan online (SMART)
  - f. SIM Data Kependudukan
  - g. SIM Wilayah (aplikasi layanan administrasi di tingkat Kelurahan dan kecamatan) yang terintegrasi dengan SIM Paten (pelayanan perijinan terpadu tingkat kecamatan)
  - h. SIMATA (aplikasi feature smart city kotabogor untuk pemantauan kota yang sudah terintegrasi dengan SIMPEG, SMART, Pengaduan online, SIL, SIPDEH, SIDAMENDEL, SIMWIL, SIMPUS dan SIM Hibah/Bansos)
  - i. SIRUP (sistem informasi/pengumuman publik tentang rencana umum pengadaan barang dan jasa)
  - j. Aplikasi e-procurement (lelang elektronik)
  - k. SIMPUS (sistem informasi manajemen Puskesmas)
  - l. Web pengaduan online
  - m. SIL (sistem informasi lingkungan hidup)
  - n. SIDAMENDEL (aplikasi informasi data menara telekomunikasi)

- 2) Administrasi dan manajemen umum :
  - a. Docman (dokumen arsip manual)
  - b. E-surat (surat elektronik)
  - c. SIMTAKA (aplikasi tata naskah dinas)
  - d. SIM administrasi perijinan
  - e. E-mail dinas
  - f. Aplikasi pengendali berkas
- 3) Administrasi legislasi :
  - a. Siskum (sistem informasi produk hukum daerah)
- 4) Manajemen pembangunan :
  - a. SIMRAL Perencanaan (manajemen informasi Musrenbang)
  - b. SIMRAL Perencanaan
  - c. Aplikasi perencanaan Hibah dan Bantuan Sosial
- 5) Manajemen keuangan :
  - a. SIMRAL (sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban yang mendukung SAKIP)
  - b. SIMBADA (sistem informasi manajemen inventarisasi aset)
  - c. Aplikasi Gaji yang terintegrasi dengan sistem gaji TASPEN
  - d. SIPKD
- 6) Manajemen kepegawaian :
  - a. SIMPEG (sistem informasi manajemen kepegawaian)
5. Perencanaan :
  - a. Perluasan dan pemecahan pusat kota ke titik transit oriented development (TOD) Sukaesmi (rencana integratif pembangunan stasiun KRL Sukaesmi dengan kawasan Olympic City)
  - b. Pembangunan transit oriented development (TOD) Stasiun KRL Bogor
  - c. Bogor transportation program (B-TOP) tentang rencana jangka panjang pembangunan sistem transportasi dan rekayasa lalu lintas
  - d. Rencana pengembangan e-Government yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan Masterplan Smart City Kota Bogor

#### **Kekuatan Sektor Privat**

1. Di sektor privat, berdasarkan RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031, wilayah Kota Bogor terbagi ke dalam 5 (lima) Wilayah Pengembangan, yaitu :
  - a. Wilayah Pengembangan A, dengan pusatnya di Kebun Raya Bogor (Kecamatan Bogor Tengah) dan sekitarnya sebagai pusat kota lama, kawasan pemerintahan, komersial dan perkantoran. Tema WP : Pengendalian, revitalisasi (pembangunan kembali) dan peremajaan kota



- (urban renewal) dengan ruang kegiatan tematiknya di bidang perdagangan jasa skala kota, perkantoran, dan RTH kota;
- b. Wilayah Pengembangan B, dengan pusatnya di kawasan Bubulak Sindangbarang (Kecamatan Bogor Barat) dan sekitarnya sebagai sub pusat kota. Tema WP : Pengembangan yang terkendali dengan ruang kegiatan tematiknya di bidang jasa akomodasi, perdagangan dan ecowisata;
  - c. Wilayah Pengembangan C, dengan pusatnya di kawasan Yasmin (Jl. KH. Abdullah Bin Nuh) dan Pasar Induk TU Kemang (Jl. KH. Soleh Iskandar) sebagai sub pusat kota. Tema WP : Pengembangan baru yang terarah dengan ruang kegiatan tematiknya di bidang sentra elektronik dan pasar induk;
  - d. Wilayah Pengembangan D, dengan pusatnya di kawasan Bogor Outer Ring Road Kedung Halang, Sentul, Warung Jambu dan Jl. Adnawijaya sebagai sub pusat kota. Tema WP : Pengembangan baru terarah dengan ruang kegiatan tematiknya di bidang jasa akomodasi, perkantoran dan wisata kuliner;
  - e. Wilayah Pengembangan E, dengan pusatnya di kawasan Tajur, kawasan rencana akses tol Bocimi, Jalan R3 dan Jalan lingkaran Bogor Inner Ring Road. Tema WP : Pengembangan terbatas dengan ruang kegiatan tematiknya di bidang sentra otomotif, wisata belanja, MICE, jasa akomodasi dan ecowisata.
2. Struktur ekonomi privat terbesar di Kota Bogor dibangun dari kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori industri pengolahan yang secara teoritis dan praktis sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Bogor sebagai kota urban.
  3. Berdasarkan data dasar tahun 2015, di Kota Bogor terdaftar 748 perusahaan dengan komposisi :
    - a. Perusahaan terbatas sebesar 40,24%
    - b. Perusahaan komanditer (CV) sebesar 32,21%
    - c. Perusahaan perorangan sebesar 24,60%
    - d. Koperasi sebesar 2,94%
  4. Berdasarkan data dasar tahun 2013, besaran Investasi di Kota Bogor pada tahun 2013 sebesar Rp. 753.468.545.912,-
  5. Perkembangan kegiatan CSR-PKBL setiap tahunnya meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2012 nilai CSR-PKBL berjumlah Rp 1.238.913.333,- Pada tahun 2013 nilai CSR-PKBL berjumlah Rp 1.700.914.228,- meningkat sebesar 462 juta rupiah dari tahun 2012. Pada tahun 2014 nilai CSR-PKBL berjumlah Rp 2.223.007.817,- meningkat sebesar 522 juta rupiah dari tahun 2013. Pada tahun 2015 nilai CSR-PKBL berjumlah Rp 5.635.667.400,-

meningkat sebesar 3.412 juta rupiah dari tahun 2014. Pertumbuhannya hampir mengikuti pola eksponensial, seperti yang tersaji dalam gambar.



**Gambar 11. Perkembangan CSR-PKBL di Kota Bogor dari Tahun 2012-2015**  
**Sumber : Angket Sekretariat Daerah Kota Bogor, 2015 (diolah)**

Keberhasilan pertumbuhan CSR-PKBL tahun 2015 tidak terlepas dari dorongan Walikota Bogor pada pihak Swasta dan BUMN/BUMD untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Bogor. Untuk mensinergikan kegiatan CSR-PKBL yang dilaksanakan oleh Swasta dan BUMN/BUMD Pemerintah Kota Bogor melalui Forum PKBL dan CSR melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, inventarisasi dan kerjasama dalam kegiatan CSR-PKBL. Perkembangan kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh swasta dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2012 nilai CSR sebesar 169.350.000 rupiah. Pada tahun 2013 nilai CSR sebesar 953.950.000 rupiah meningkat sebesar 784 juta rupiah dari tahun 2012. Pada tahun 2014 nilai CSR sebesar 727.972.817 rupiah, turun sebesar 225 juta rupiah dari tahun 2013. Pada tahun 2015 nilai CSR sebesar 2.748.998.400 rupiah, meningkat sebesar 2 miliar rupiah dari tahun 2014. Pertumbuhan nilai CSR di Kota Bogor dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengikuti pola polynomial.



**Gambar 12. Perkembangan CSR di Kota Bogor Tahun 2012-2015**  
**Sumber : Angket Sekretariat Daerah Kota Bogor, 2015 (diolah)**

Gambar diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai CSR pada tahun 2014 dibandingkan dengan nilai CSR pada tahun 2013. Bila diperhatikan pola tersebut perusahaan swasta ada kecenderungan bahwa pengeluaran CSR-nya mengikuti pola 2 tahunan dari keuntungan perusahaan. Oleh sebab itu Forum CSR-PKBL harus mampu mengantisipasi ini dengan melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga (swasta) dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai oleh dana CSR dan sekaligus mengolah dan memelihara hasil pekerjaan tersebut.

6. Public Private Partnership (PPP) telah dikembangkan antara pemerintah dengan pihak swasta di Kota Bogor antara lain dalam hal :
  - a. *purchasing contract* yaitu kontrak pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh anggaran pemerintah melalui APBD.
  - b. *service contract* yaitu kontrak pelayanan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan BUMD dengan pihak penyedia jasa layanan, misalnya dalam pencatatan, penarikan dan pengumpulan tagihan meter air, online payment point PBB/BPHTB/Tagihan PDAM (dengan Bank Mandiri, Bank BJB, Kantor Pos), pembukaan kantor kas BJB di instansi perangkat daerah, dll.
  - c. *management contract*, yaitu kontrak kerjasama pada tingkatan operasional manajemen dan maintenance (perawatan), misalnya kerjasama pengelolaan Pasar Bogor dengan pihak ketiga, kerjasama Kota Bogor dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Blok C dan D Pasar Kebon Kembang, dll.
  - d. *Build operate transfer*, yaitu perjanjian sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan Taman Topi dan Taman Bermain Ade Irma Suryani.
  - e. *Concession*, yaitu kerjasama antara pemerintah Kota Bogor dengan Yayasan Karya Bhakti dalam pembangunan, operasional dan pengelolaan

RSU Karya Bhakti sejak tahun 1984 yang saat ini telah berakhir berdasarkan Perda Kota Bogor No 5 Tahun 2013 pada tanggal 7 Agustus 2014 telah diserahkan ke Pemerintah Kota Bogor dan saat ini bernama RSUD Kota Bogor.

- f. *Community based provision*, yaitu kerjasama antara pemerintah dengan perorangan/keluarga/perusahaan kecil ataupun dengan non government organization (NGO) di bidang pengelolaan persampahan berbasis komunitas dalam bentuk tempat pembuangan sampah reduce, reuse dan recycle (TPS3R) dan bank sampah lingkungan di beberapa kelurahan.
7. Jumlah bank selang tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami perubahan yang dinamis dengan rincian :

**Tabel 1. Jumlah Bank berdasarkan jenis di Kota Bogor Tahun 2010-2015**

NO.	JENIS BANK	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pemerintah	4	4	4	4	4	4
2	Swasta Nasional	29	31	30	31	32	36
3	Pembangunan Daerah	1	1	2	2	1	2
4	BPR	9	7	7	6	7	8
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>50</b>

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2016

### **Kekuatan Sektor Publik/masyarakat/komunitas**

Kekuatan sektor publik dibangun dari potensi masyarakat pada bidang :

1. Keberagaman Agama

Berdasarkan sensus BPS, dari 1.020.084 penduduk Kota Bogor pada tahun 2014 sebanyak 955.708 jiwa atau 93,68% menganut agama Islam. Sebanyak 41.282 jiwa atau 4,06% menganut agama Protestan dan 23.094 jiwa atau 2,26% menganut agama Katolik. Sedangkan sisanya tidak sampai 1% terdistribusi merata sebagai pemeluk agama Buddha dan Hindu (termasuk Kong Hu Cu)

2. Politik

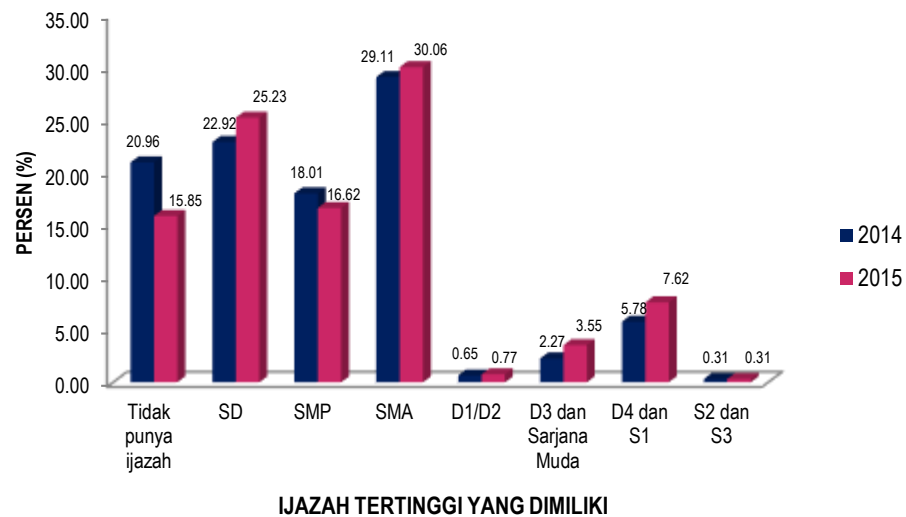
Berdasarkan data statistik KPU Kota Bogor tahun 2014, dari jumlah pemilih sebanyak 680.176 orang, dari 1.707 TPS yang tersebar di 68 kelurahan tercatat bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu di Kota Bogor di level Pilpres dan Pilleg mencapai angka antara 75,85% (Pilleg) hingga 79,12% (Pilpres). Untuk level kelurahan, tingkat partisipasi terendah ada di angka 63% (pusat kota), dan tertinggi sebesar 86% (sub pusat kota).

3. Ekonomi

- a. Pertumbuhan perekonomian Kota Bogor pada tahun 2016 berada di level 6,73% dari tahun dasar 2012 yang berada di level 6,31%. Kategori pertumbuhan ekonomi di bidang usaha informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 12,36%. Pertumbuhan tersebut tentunya dipengaruhi oleh adanya perubahan budaya masyarakat kekinian yang saat ini mengandalkan pola hubungan daring (internet), baik untuk usaha, pekerjaan, pendidikan, rekreasi, maupun kontak sosial. Kategori lain yang tumbuh cukup signifikan adalah kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,17% dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,98%.
- b. Pada tahun 2016 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah sebesar 33,25 juta rupiah per tahun, tumbuh sebesar 7,67% dari tahun 2015. Sedangkan dari tahun 2011 hingga 2015 pertumbuhan PDRB rata-rata per tahun adalah sebesar 9,51%.
- c. Rata-rata laju inflasi Kota Bogor adalah sebesar 0,41%. Inflasi tahun 2009 dan 2011 masih di kisaran 2,16% sampai 2,85%. Di tahun 2010 mencapai 6,57% dan pada tahun 2013 mencapai 8,55%.
- d. Indeks Gini (Gini rasio) atau ketimpangan pendapatan di Kota Bogor adalah sebesar 0,3403 point dari skala indeks 0 s.d 1, indeks gini berada <0,5 yang artinya ketimpangan penyebaran/pemerataan pendapatan di Kota Bogor berada di level rendah.
- e. Jumlah penduduk miskin di tahun 2015 mencapai 79.200 jiwa atau sebesar 7,60% populasi penduduk. Trend kemiskinan semenjak 2012 sebesar 84.500 jiwa penduduk miskin, terus menurun setiap tahunnya sebesar 1,4%. Sedangkan garis kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya sebesar 5,2% dari nilai Rp 335.894,- perkapita per bulan di tahun 2012 hingga sebesar Rp 392.405,- per kapita per bulan di tahun 2015.

#### 4. Sosial

- a. Angka melek huruf di tahun 2016 sebesar 99,20%. Sebesar 0,8% tuna aksara diisi oleh penduduk usia lanjut yang kefungsionalannya tidak dapat ditingkatkan lagi.
- b. Jumlah penduduk Kota Bogor pada jenjang usia produktif pada umumnya memiliki tingkat pendidikan tertinggi sampai dengan perguruan tinggi.



**Gambar 13. GRAFIK PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI**  
**Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2016**

- c. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2015 mencapai 73,65, meningkat 24 basis poin dari IPM yang dicapai pada tahun 2014 yang berada pada titik 73,10. Dengan nilai IPM sebesar 73,65 Kota Bogor berada di peringkat ke-5 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat setelah Depok, Bekasi, Bandung dan Cimahi. Adapun eskalasi peningkatan IPM Kota Bogor dari tahun 2011 s.d 2017 adalah : 71,72 (2011), 72,25 (2012), 72,86 (2013), 73,10 (2014), dan 73,65 (2015)

5. Budaya

- a. Sebagaimana posisinya sebagai kota penyangga ibukota yang mengemban fungsi sebagai kota pemukiman dan daerah tujuan urbanisasi terbatas, masyarakat Kota Bogor terdiri dari berbagai macam suku bangsa, yang membawa tradisi dan budayanya masing-masing. Berdasarkan sejarah berdirinya, Kota Bogor bukan hanya diisi oleh beragam suku bangsa dari Indonesia, tetapi juga terdapat berbagai macam suku bangsa dari belahan lain di dunia. Keragaman khasanah budaya tersebut menyebar secara merata di Kota Bogor. Hingga saat ini, bisa dikatakan, hanya 2 (dua) daerah yang masih memiliki identitas khusus sebagai kawasan budaya tertentu, yaitu kawasan Suryakencana dengan tradisi cina atau tiong hoa, dan kawasan empang dengan tradisi jazirah arab. Selain daripada itu, wilayah2 di Kota Bogor bersifat lebih egalitarian dan nasionalis dengan interaksi berbagai macam tradisi dan budaya lokal yang melekat dalam kehidupan masyarakatnya.
- b. Perlahan namun pasti, perkembangan budaya secara global telah mulai berpenetrasi dalam kehidupan anak-anak muda Kota Bogor. Berbeda

dengan kondisi di tahun 1980 dan 1990 an. Saat ini sangat jarang ditemukan orang-orang yang berusia muda berbincang-bincang ataupun berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sunda. Bahasa nasional saat ini menjadi pilihan pertama dalam berkomunikasi. Begitupun halnya dengan permainan tradisional. Sangat sulit menemukan anak-anak di Kota Bogor yang masih memainkan permainan tradisional kecuali dalam event tertentu.

- c. Telah memasyarakatnya gawai cerdas di kalangan anak2 juga mempengaruhi tradisi dan budaya di kalangan anak-anak. Tidak terbatas di dalam rumah tangga, di kawasan ruang pendidikan pun perubahan ini cukup membawa pengaruh yang signifikan dalam mendorong interaksi sosial anak-anak. Oleh karena itu, saat ini di banyak unit pendidikan dasar dan menengah, kebijakan “tidak boleh mengaktifkan gawai di lingkungan sekolah bagi siswa” menjadi penting dan perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Adanya potensi merusak dari gawai cerdas perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak, terutama orang tua dan para pendidik. Pembelajaran pemanfaatan teknologi gawai cerdas merupakan suatu kebutuhan, baik di level keluarga, maupun di level lembaga pendidikan. Pendidikan ini harus bersifat inklusif dengan menyertakan metode e-learning yang terukur.

## 6. Kesehatan

- a. Untuk layana kesehatan, masyarakat ditopang oleh layana 19 rumah sakit dengan jumlah tempat tidur sebanyak 2.024 beds, 24 Puskesmas dengan 59 beds, 29 Puskemas Pembantu dan 3 Puskesmas Keliling. Selain itu terdapat 602 praktek dokter umum, 554 dokter spesialis, 290 dokter gigi, 94 klinik kesehatan (balai pengobatan) dan 14 laboratorium kesehatan.
- b. Angka harapan hidup (AHH) masyarakat Kota Bogor saat ini mencapai 72,88 tahun. Terdapat eskalasi AHH di Kota Bogor sejak tahun 2011 s.d 2015 mengikuti deret ukur sebagai berikut : 72,55 (2011), 72,56 (2012), 72,57 (2013), 72,58 (2014) dan 72,88 (2015).

## 7. Tingkat pendidikan dan literasi

- a. Angka harapan lama sekolah (HLS) mencapai 12,36 tahun, sedangkan angka rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 10,20 tahun.
- b. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Bogor mengalami eskalasi sejak tahun 2011 s.d 2017 sebagai berikut : 9,43 (2011), 9,60 (2012), 9,96 (2013), 10,01 (2014), dan 10,20 (2015).

### **Kekuatan Sektor Pendidikan Tinggi**

- a. Dari data yang dirilis BPS Kota Bogor dalam buku Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2017, diperoleh data dari 12 perguruan tinggi yang ada di Kota Bogor, di tahun 2016 tercatat jumlah mahasiswa berdasarkan jenjangnya sebagai berikut :
  - 1) Diploma III sebanyak 10.145 orang
  - 2) Diploma IV sebanyak 368 orang
  - 3) Strata 1 sebanyak 38.181 orang
  - 4) Strata 2 sebanyak 5.259 orang
  - 5) Strata 3 sebanyak 1.563 orang

### **Identifikasi kelemahan**

Kelemahan utama yang teridentifikasi di Kota Bogor adalah sebagai berikut :

- a. Kemacetan.

Posisi Kota Bogor yang berada di pusat wilayah Kabupaten Bogor menimbulkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

  - 1) Kemacetan, sebagai dampak langsung dari tingginya tarikan dan bangkitan transportasi/lalu lintas di daerah-daerah pinggiran Kota Bogor.
  - 2) Sistem dan jaringan transportasi Kota Bogor juga melayani masyarakat Kabupaten Bogor yang bermukim di wilayah Barat dan Selatan Bogor.
  - 3) Pemanfaatan Fasilitas kota yang ada di Kota Bogor secara umum telah memunculkan adagium “Kota Bogor adalah taman bermainnya warga kabupaten” yang secara nyata memberikan kontribusi terhadap munculnya potensi masalah dalam berbagai bentuk di dalam kota.
  - 4) Posisi stasiun bogor (sebagai stasiun utama dan stasiun tujuan akhir) di pusat kota dengan tingkat pelaju komuter sebanyak kurang lebih 600 ribu komuter sertiap harinya belum didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai dan humanis yang
- b. Keterbatasan Luas Wilayah

Luasan Kota Bogor yang kecil (118,50 km persegi) dengan jumlah populasi yang diestimasi akan mencapai angka 1,6 juta jiwa di tahun 2031 dimana secara nasional proyeksi jumlah penduduk yang memilih untuk tinggal di perkotaan akan melambung sebesar 85% sedangkan jumlah penduduk di pedesaan hanya akan ada di kisaran 15% akan berdampak signifikan pada penambahan dan pertumbuhan ruang aktivitas terhadap ketersediaan dan penyusutan ruang terbuka di Kota Bogor. Dengan kata lain, dalam kondisi do nothing terhadap luasan wilayah kota, **Kota Bogor tidak dapat terus membangun gedung dan jalan.**
- c. Keterbatasan Infrastruktur Jalan.



Luas dan kondisi jalan di Kota Bogor memiliki kekurangan antara lain :

- 1) Ruas jalan rata-rata pendek dengan lebar jalan yang sempit.
- 2) Rata-rata lebar jalan di Kota Bogor  $\pm 18$  m.
- 3) Kemampuan tampung pada jam-jam sibuk rendah, mengingat jalanan kota harus mampu menampung :
  - 23 trayek angkutan kota dengan jumlah armada 3.412 unit.
  - 10 trayek angkutan perkotaan antar kota dalam propinsi (AKDP) s=dengan jumlah armada 4.426 unit.
  - Kendaraan pribadi roda empat atau lebih dan kendaraan roda dua berkode domisili kota bogor dengan estimasi peredaran harian sekitar  $\pm 86.098$  unit, dengan rincian 20.476 unit mobil (berbagai jenis) dan 65.622 unit sepeda motor.
- 4) Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, di satu sisi menurunkan permintaan (demand) atas kendaraan umum dan di satu sisi juga menambah beban jalan dari segi kapasitas.
- 5) 2 Ruas jalan arteri primer, 5 ruas jalan arteri sekunder dan 9 ruas jalan kolektor primer serta 9 ruas jalan kolektor sekunder menjadi tulang punggung yang menanggung 99% beban volume kendaraan di Kota Bogor.

d. Kelemahan Infrastruktur Trotoar dan Pedestrian.

Trotoar atau seksi median jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki tidak sepenuhnya fungsional dikarenakan banyaknya faktor pengganggu, antara lain :

- 1) Kondisi trotoar yang tidak laik fungsi secara fisik dan infrastruktur, antara lain karena kerusakan, ketinggian yang tidak standar, pembatas yang tidak dapat diakses oleh kaum difabel, dan sebidang dengan pohon peneduh.
- 2) Penyalahgunaan fungsi trotoar dalam bentuk :
  - Dijadikan lapak para pedagang kaki lima
  - Dijadikan halaman parkir tanpa ijin resmi
  - Dijadikan tempat parkir liar
  - Dibongkar dan dijadikan jalan masuk tanpa ijin resmi
  - Dalam jam-jam tertentu dan ruas-ruas tertentu, trotoar banyak digunakan oleh pengendara motor yang menghindari kemacetan

e. Tingginya Urbanisasi dan Sektor Informal.

Masih terlihatnya (di banyak ruas jalan dan lokasi di Kota Bogor) tenaga kerja Sektor Informal (baik yang sah maupun tidak sah) yang bermanifestasi dalam bentuk pedagang kaki lima, pedagang kelontong, pedagang keliling, pedagang jasa keliling ataupun kegiatan lain dari para penyandang masalah

kesejahteraan sosial seperti halnya pengemis, pengamen, anak jalanan, pedagang asongan, pekerja seks komersial, pemulung, pencuri, penadah barang curian, pemalsu, penipu, penjudi dan lain-lain. Berdasarkan kajian secara umum, jumlah pekerja sektor informal di sebuah kota dapat mencapai 30% sampai dengan 70% dari jumlah populasi tenaga kerja. Di Kota Bogor, belum ada data yang pasti mengenai jumlah tenaga kerja di sektor informal ini. Dari jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 780.951, sebanyak 450.925 orang termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja, dimana 11,08% nya merupakan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Urbanisasi turut berperan dalam terciptanya tenaga kerja sektor informal.

#### **Identifikasi ancaman**

1. Arus informasi dan globalisasi yang tidak terbendung dan tersaring
2. Arus Urbanisasi yang Cepat
3. Hilangnya Ruang Publik
4. Disparitas Pendapatan antar Penduduk
5. Semakin terbukanya akses dan jaringan transportasi

#### **SMART GOVERNANCE**

Smart Governance memberikan tekanan pada peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi pelayanan kepada masyarakat secara cerdas, yaitu dengan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Pengelolaan pemerintahan secara cerdas tidak dapat lepas dari peranan masyarakat yang mengambil posisi penting, bukan hanya sebagai obyek pembangunan dan pemerintahan, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai subyek dan partisipan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri. Budaya, nilai, moral etik dan tradisi yang ada di Kota Bogor turut menjadi faktor enabler smart governance sebagai pembentuk kearifan lokal yang membantu mengidentifikasi seberapa cerdas pemerintah dalam pengelolaan pemerintahannya.

Dari bab sebelumnya, smart governance akan bergerak pada 3 (tiga) area kerja dan 8 (delapan) indikator sebagai penciri utama sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik :
  - a. Layanan administrasi masyarakat
  - b. Layanan informasi publik
  - c. Layanan sosial masyarakat
2. Manajemen Birokrasi yang efisien :
  - a. Akuntabilitas tata kelola e-birokrasi

- b. Transparansi pemerintahan
- c. Implementasi e-government
- 3. Manajemen kebijakan publik :
  - a. Partisipasi perencanaan publik
  - b. Akses informasi publik

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang telah diberikan. Pelayanan publik sebagai area kerja penciri utama pemerintah yang cerdas harus memenuhi 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan, yaitu :

1. Pelayanan haruslah berwujud dan terukur, yang diindikasikan oleh :
  - a. Penampilan petugas rapi dan bersih
  - b. Kenyamanan tempat pelayanan
  - c. Kemudahan dalam mengakses pelayanan
  - d. Kemudahan dalam proses pelayanan
  - e. Kedisiplinan petugas pemberi layanan
  - f. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan yang memenuhi prinsip smart city yang mengedepankan inovasi
2. Pelayanan yang diberikan haruslah handal dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat, yang diindikasikan oleh :
  - a. Kecermatan petugas dalam pemberian layanan
  - b. Memiliki standar pelayanan yang jelas yang dibuktikan oleh adanya Standar Operating Procedure (SOP)
  - c. Kompetensi petugas dalam mengoperasikan alat bantu yang digunakan dalam layanan tersebut, baik alat teknis maupun peralatan yang berbasis aplikasi dan internet
3. Pelayanan harus cepat tanggap/responsif, yang diindikasikan oleh :
  - a. Petugas merespon konsumen/masyarakat sesuai dengan tuntutan/permintaan yang disampaikan sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan
  - b. Petugas pelayanan dalam responnya dapat melakukan koordinasi baik secara horisontal maupun vertikal untuk dapat memberikan respon yang baik yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat
  - c. Respon yang dilakukan petugas haruslah memenuhi prinsip cepat, tepat, cermat, waktu yang terukur dan kehati-hatian.
4. Pelayanan harus memberikan jaminan layanan, yang diindikasikan oleh :
  - a. Jaminan ketepatan waktu buka/tutup pelayanan
  - b. Jaminan ketepatan waktu penyelesaian
  - c. Jaminan biaya pelayanan (jika ada penetapan biaya layanan)

- d. Jaminan pasca layanan dalam hal penanganan koreksi/perbaikan produk layanan, keluhan, dan penyelesaian sengketa layanan
5. Pelayanan harus dilaksanakan dengan nilai moral, etika dan rasa empati, yang diindikasikan oleh :
  - a. Mendahulukan kepentingan pelanggan/konsumen/pemohon
  - b. Pelayanan dilaksanakan dengan ramah, sopan, santun, dan menghargai
  - c. Tidak diskriminatif (membeda-bedakan) dan mengedepankan kesetaraan gender

Untuk memperoleh Strategi yang yang tepat dalam upaya perwujudan smart governance (kepemerintahan yang cerdas) pemetaan terhadap kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (oportunities) dan ancaman (threat) dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan masa depan Kota Bogor dan heterogenitas/pluralisme masyarakat.

Tabel 2. Tabel Indikator Smart Governance

SMART GOVERNANCE		
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat Online Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengintegrasikan layanan publik berbasis online</li> <li>• Menata layanan berbasis web yang user friendly</li> </ul>
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
	Persentase inovasi masyarakat yang berhasil diimplementasikan untuk menunjang visi misi Kota Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendata inovasi dari stakeholders</li> <li>• Mengembangkan inovasi melalui manajemen inovasi</li> </ul>
Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	Indeks Penyelenggaraan e-Government	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ meningkatkan prasarana dan sarana e-government</li> <li>✓ meningkatkan kualitas tata kelola e-government</li> <li>✓ menata dan menguatkan biokrasi dan kelembagaan ternasuk organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, dan</li> </ul>

		sistem manajemen sumber daya aparatur ✓ menata dan menguatkan ekosistem e-government
	Persentase Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Mengoptimalkan kinerja pengawasan internal
Meningkatnya Keterlibatan Publik Dalam Manajemen Kebijakan Publik	Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mereview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK)</li> <li>• Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang</li> </ul>
	Persentase Masyarakat Yang Mengakses Website Kota Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan desain website</li> <li>• Menjadikan website kota bogor sebagai sumber rilis informasi kegiatan perangkat daerah</li> </ul>

### SMART BRANDING

Strategi utama dalam mewujudkan smart branding adalah dengan melakukan :

1. Pengenalan Smart City Branding: Membangun Daya Saing Daerah melalui Pariwisata, Bisnis dan Wajah Kota
2. Masterplan Pembangunan Daerah berbasis Smart City Branding: Panduan Mewujudkan Daerah Yang Maju Dan Berkelas Dunia melalui Kerangka Smart City Branding
3. Membangun Arsitektur Daerah Berkelas Dunia: Panduan Mendesain Wajah Daerah Dengan Mengadopsi Nilai-Nilai Lokal Bercita Rasa Global
4. Strategi Pemasaran Daerah Melalui Brand Daerah yang Solid: Panduan Menyusunan Strategi, Taktik, Dan Visualisasi Brand Daerah
5. Meningkatkan Investasi Daerah Melalui Strategi Branding: Panduan Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah melalui Strategi Pemasaran di Era Digital
6. Pelayanan Investasi Daerah untuk Mendukung Smart City Branding: Membangun Soft Skill Pelayanan Prima untuk Memperkuat Branding Daerah

Tabel 3. Tabel Indikator Smart Branding

SMART BRANDING		
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Berkembangnya Ekosistem Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menata penanda wisata, rambu wisata yang unik</li> <li>• Mewujudkan informasi wisata digital (berbasis TIK)</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata</li> <li>• Mengembangkan strategi pemasaran baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional</li> </ul>
	Persentase Pengembangan Kampung Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong masyarakat untuk kreatif di bidang ekonomi dan pariwisata</li> <li>• Mendorong masyarakat untuk mengangkat potensi wilayahnya yang dapat memberikan dampak perekonomian</li> </ul>
Berkembangnya Ekonomi Kreatif Daerah	Pembangunan Bogor e-commerce	Membangun bogor e-commerce yang terintegrasi dengan website kota bogor
	Persentase Pemberdayaan Pemuda Wirausaha	Mendorong semangat wirausaha melalui organisasi kepemudaan, komunitas pemuda dan pelajar
	Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan
Terciptanya Wajah Kota Dengan Tata Ruang Yang Berkualitas	Persentase Taman Kota Tematik Yang Berkualitas	<p>Mewujudkan taman kota yang nyaman, aman dan layak bagi anak, pemuda dan lansia.</p> <p>Meningkatkan layanan publik wifi yang mengedukasi user</p>
	Persentase Preservasi	Menerakan papan informasi

Bangunan Kota Pusaka	nilai sejarah pada bangunan-bangunan kota pusaka
Jumlah Navigasi Unik Kota Bogor Berbasis Aplikasi, Virtual dan atau Augmented	Mengembangkan pola navigasi wisata digital

### SMART ECONOMY

Smart economy pada dasarnya dibangun untuk menciptakan daya saing daerah. Daya saing yang ingin dibangun di Kota Bogor adalah daya saing di bidang pariwisata dan pelayanan publik terkait investasi, penanaman modal, pelayanan perpajakan, pengendalian kebocoran pendapatan.

Penegakan regulasi, penghapusan pungutan liar, jaminan waktu dan kualitas layanan diupayakan dicapai melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses layanan publik di bidang perijinan, penanaman modal dan investasi serta perpajakan daerah. Layanan digital berbasis perbankan pun akan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran pemerintah dengan asumsi semakin transaksi dibangun secara non tunai, maka akan semakin kecil peluang dan tingkat kebocoran anggaran yang dapat terjadi.

Penerapan teknologi dalam pelayanan publik tersebut diharapkan mampu menjadi trigger (pemicu) bagi pertumbuhan ekonomi kota yang secara nyata dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran serta menjadi faktor pendorong tumbuhnya wirausaha muda.

Tabel 4. Tabel Indikator Smart Economy

SMART ECONOMY		
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Pelayanan Berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pajak Daerah	Mengembangkan sistem layanan berbasis elektronik untuk menekan kebocoran dan mengoptimalkan pendapatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Perijinan	Meningkatkan kenyamanan, keramah tamahan dan kemampuan petugas layanan
	Meningkatnya Jumlah Wisata Kuliner	Mengembangkan kawasan wisata kuliner yang kaya rasa,

		kaya menu, nyaman dan aman
	Tingkat Okupansi Kios Pada 5 Pasar Besar	Mengoptimalkan penerapan regulasi, layanan prasarana dan sarana pasar yang berkualitas
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Angka Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memperbaiki program perlindungan sosial</li> <li>✓ Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar</li> <li>✓ Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin</li> </ul>
	Angka Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>✓ Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat</li> <li>✓ Menunbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat yang menghasilkan lapangan pekerjaan yang produktif</li> <li>✓ Menciptakan persaingan yang sehat dan peluang usaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat</li> </ul>
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan pelatihan kewirausahaan yang menghasilkan lapangan pekerjaan yang produktif</li> <li>✓ Meningkatkan peluang usaha bagi pengusaha kecil dengan jaminan pasar dan harga</li> </ul>
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Transaksi “non Tunai” Berbasis Perbankan	Menata dan meningkatkan transaksi non tunai dalam realisasi anggaran pemerintah
	Persentase Transaksi Berbasis Uang Elektronik	Mengembangkan sistem pembayaran/transaksi non tunai di lingkungan badan



**SMART LIVING**

Pengembangan hunian dan pola kehidupan cerdas dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada dasarnya dilaksanakan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Strategi umum yang diterapkan yaitu meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan, informasi dan pengetahuan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat perkotaan. bukan hanya itu, kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, informasi dan pengetahuann hidup sehat dan berkualitas bagi masyarakat diupayakan dengan menerapkan pola ruang terintegrasi yang memberikan kemudahan akses dan penyediaan sarana komunikasi publik terkait hal tersebut.

Pengembangan hunian cerdas tentunya memiliki kaitan yang erat dengan bagaimana cara manusia bergerak dari satu poin ke poin selanjutnya. Terbatasnya wilayah, kapasitas jalan, dan tingginya volume kendaraan menjadi faktor pendorong utama bagi pemerintah dan swasta untuk bersama-sama bergerak dan membangun komitmen dalam menciptakan layanan transportasi publik yang berkualitas yang dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam mobilitasnya.

Tabel 5. Tabel Indikator Smart Living

SMART LIVING		
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Terkendalinya Tata Ruang Kota Bogor	Konsistensi Pemanfaatan Ruang	✓ Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang
	Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Mengembangkan rencana kawasan di masa depan dengan desain integratif dan berwawasan lingkungan
Meningkatnya Layanan Kesehatan	Persentase Penggunaan SIMPUS	Meningkatkan pemanfaatan SIMPUS di seluruh Puskesmas
	Persentase Penggunaan Layanan	Mengembangkan sistem pendaftaran puskesmas

	Kesehatan Berbasis Web	dengan metode pendaftaran online
	Persentase Penggunaan Layanan Rujukan elektronik (e-SIR)	Mengembangkan dan menyebarluaskan penggunaan e-SIR di seluruh praktek bidang persalinan
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum, Prasarana dan Sarana Transportasi	Persentase Konversi Angkutan Umum berbasis Minibus ke Bis Kecil	Mengembangkan layanan jasa transportasi yang berkualitas
	Persentase Pembangunan Jalan R3, Bogor Inner Ring Road (BIRR)	Mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur sesuai arahan rencana tata ruang
	Persentase Angkutan Umum yang Konversi dari BBM ke BBG	Mengupayakan percepatan konversi dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung
	Persentase Penggunaan e-Money	Mengembangkan sistem pembayaran angkutan umum secara non tunai
	Persentase Pedestrian Yang Berkualitas dan Pro Disabilitas	Menata dan mengupayakan percepatan pembangunan pedestrian pada kawasan strategis

## SMART SOCIETY

Society atau masyarakat pada dasarnya dibangun dari individu-individu yang masing-masing memiliki ide, nilai moral dan etik, keyakinan, cara pandang, kebiasaan, dan pandangan masa depan yang sangat beragam. Dalam tatanan masyarakat cerdas, meningkatnya interaksi sosial masyarakat baik antar individu, antara individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok harus mampu membentuk sebuah tatanan yang produktif secara positif.

Secara luas, smart society yang disatukan oleh teknologi digital melalui layanan pemerintah dan institusi swasta, dapat mendorong perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik secara sosial, ekonomi dan membantu pemerintah dan institusi swasta mencapai efektivitas layanannya. Hal tersebut dapat

tercapai jika terjadi perkembangan tiga arah, dimana literasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam hal teknologi informasi dan komunikasi berada dalam level yang sama.

Pemuda, diyakini sebagai bahan bakar perubahan dalam sebuah kota perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk diberdayakan dan dikembangkan karena pemuda pun diyakini sebagai sumber inovasi dan kreatifitas.

Sebagai aset serta subyek dari pembangunan sebuah kota, masyarakat harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Keamanan, keselamatan dan keberlangsungan hidupnya merupakan salahsatu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat membantu pemerintah dan lingkungan tempat mereka berada, masyarakat berhak mendapatkan informasi, pengetahuan dan peningkatan kemampuan mitigasi bencana dalam mengantisipasi dan menghadapi hal-hal kebencanaan yang berpotensi muncul dan menimpa diri, keluarga, harta serta lingkungan mereka.

Pengembangan cerdas masyarakat kota yang inovatif dan kreatif dalam menciptakan daya saing dikembangkan dengan memanfaatkan potensi keragaman sosial-budaya sebagai modal dasar. Kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan perlu mendapat dukungan penelitian dan pengembangan dimana keterlibatan aktif masyarakat dibangun dengan semangat keterbukaan dan kerjasama.

Tabel 6. Tabel Indikator Smart Society

SMART SOCIETY		
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kepeloporan, Kewirausahaan, Jambore Pemuda dan Jambore Komunitas	Meningkatkan peran serta kepemudaan dalam kegiatan pemuda pelopor, pemuda wirausaha, pertukaran pemuda antar negara, jambore pemuda dan jambore komunitas
	Tingkat Partisipasi Pelajar Dalam Paskibraka	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kapasitas paskibraka kota bogor
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Event	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan peran serta Kota Bogor dalam</li> </ul>

	Sosial, Olahraga, Seni dan Budaya	O2SN, POPWIL, POPDA, POSPEDA, POSPENAS, dan Olahraga Tradisional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menata, merenovasi dan mengembangkan gelanggang olahraga dan pemuda Kota Bogor</li> </ul>
Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang T.I.K	Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Yang Menyelenggarakan e-Learning	Mengembangkan metodologi e-learning bagi anak Usia Dini, SD dan SMP Mengupayakan peningkatan kesadaran pemanfaatan gawai dan internet secara positif dan produktif
	Jumlah Kegiatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Dengan Stakeholders Relawan TIK	Mengkampanyekan cara bersosial media secara cerdas, sehat, dan anti diskriminasi sara
Meningkatnya Layanan Kebencanaan	Persentase Kelurahan Siaga Bencana	Menata dan mengembangkan pembentukan kelurahan siaga bencana
	Persentase penanganan bencana yang sesuai dengan waktu tanggap	Meningkatkan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana
	Jumlah Sosialisasi Mitigasi Cerdas Kebencanaan	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebencanaan
	Jumlah Pengaduan Melalui Nomor Tunggal Panggilan Darurat	Mengembangkan sistem pelaporan kedaruratan yang efisien, efektif dan responsif

### SMART ENVIRONMENT

Pengembangan lingkungan kota yang cerdas melalui pengelolaan sumber daya lingkungan menuntut strategi yang kuat dan mulai bergerak untuk memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang setiap saat.

Mengembangkan jaringan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan antara pemerintah, swasta, masyarakat dan kalangan akademisi sangatlah penting dalam memberi kekuatan dan daya dorong dalam upaya mengembangkan pengelolaan lingkungan udara dan air perkotaan berbasis teknologi.

Hal tersebut berlaku juga dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan hasil kegiatan perkotaan terkait dengan tingginya produksi sampah dan limbah dalam sebuah ekosistem kota. Pendekatan zero waste berbasis teknologi, penerapan konsep daur ulang dan skema circular economy berbasis sampah/limbah merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan.

Menyadari akan potensi berkurangnya sumber energi dunia berbasis fosil dan komitmen dunia untuk menekan tingkat polusi yang ditujukan untuk menghambat pemanasan global, mendorong dan memberi daya ubah bagi manusia untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan, dengan mendorong seluruh potensi yang dimiliki kota.

Tabel 7. Tabel Indikator Smart Environment

SMART ENVIRONMENT		
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Proteksi Terhadap Lingkungan Hidup	Persentase Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menyediakan RTH publik yang cukup dan berkualitas sesuai arahan Rencana Tata Ruang</li> <li>✓ Memelihara, mengelola dan mengoptimalkan RTH publik agar fungsi bioekologis, sosial, ekonomi, dan estesisnya tetap terjaga</li> </ul>
	Indeks Kualitas Udara Dan Air Sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan lingkungannya</li> <li>✓ Melestarikan keseimbangan ekosistem dan</li> </ul>

		keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan
	Cakupan Kawasan Lindung	Mengamankan kawasan lindung yang telah ditetapkan
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Berbasis Masyarakat	Volume Sampah Terangkut Ke TPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R</li> <li>✓ Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R</li> <li>✓ Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian dan perdagangan</li> <li>✓ Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan</li> </ul>
	Persentase Sampah Tangga Reduksi Rumah	Mendorong masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi melalui pendekatan circular economy
	Persentase Layanan Air Limbah Bagi Masyarakat Yang Tidak Memiliki Saluran Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan ketersediaan septic tank komunal pada daerah kumuh dan daerah terindikasi</li> <li>✓ Mengembangkan metoda, sarana dan tehnik layanan air limbah yang dapat menjangkau lokasi tersulit</li> </ul>
Terciptanya Tata Kelola Energi Yang	Persentase Penggunaan BBG	Meningkatkan penggunaan BBG tidak terbatas hanya

Berwawasan Lingkungan		pada angkutan umum perkotaan
	Persentase Penggunaan Bio Diesel	Mengupayakan pemanfaatan limbah minyak sawit/kelapa sebagai sumber bahan bakar kendaraan diesel
	Terbangunnya Pembangkit Listrik Bertenaga Sampah	Mengupayakan percepatan kerjasama pembangunan PLTS
	Terbangunnya Stasiun Hidrologi Listrik Skala Kecil (Mikrohidro)	Mendorong pemanfaatan tenaga aliran sungai sebagai sumber tenaga listrik skala kecil bagi rumah tangga
	Persentase Penggunaan Tenaga Surya Pada Utilitas Publik	Meningkatkan penggunaan tenaga surya pada sarana umum

MASTERPLAN SMART CITY DAERAH

*smart city*

KOTA BOGOR



Rencana aksi smart city merupakan langkah awal dari suatu upaya perubahan yang sistematis. Perencanaan perubahan tersebut berangkat dari masalah yang jelas dan spesifik sehingga diharapkan mampu menciptakan rencana-rencana yang memiliki tolok ukur keberhasilan yang pasti. Oleh karena itu, rencana aksi smart city Kota Bogor disusun dengan menggunakan prinsip :

1. Specific (spesifik)
2. Measureable (terukur)
3. Achievable (dapat dicapai)
4. Realistic (realistik)
5. Timebound (batas waktu)

Dalam rencana aksi ini, ditetapkan breakdown dari berbagai goal atau tujuan utama yang bertujuan untuk menjawab problem statement, aktivitas, objektif, hingga tugas-tugas (tasks) atau eksekusi kegiatan-kegiatan yang perlu dan akan dilakukan terkait perubahan yang akan dilakukan. Rencana aksi smart city dibagi dalam 4 (empat) Rencana, yaitu :

1. Pengembangan kebijaksanaan dan kelembagaan smart city
2. Rencana pembangunan infrastruktur pendukung smart city
3. Rencana pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung smart city
4. Rencana penguatan literasi smart city

#### **PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN SMART CITY**

Pembangunan dan pengembangan Kota Bogor berwawasan smart city pada dasarnya merupakan salah satu upaya dalam rangka pembangunan wilayah dan sumber daya (manusia, alam, buatan, dan teknologi) secara optimal, efisien dan efektif. Pengembangan kebijakan dan kelembagaan smart city pada prinsipnya merupakan suatu bentuk daya dan upaya untuk :

1. Memberikan landasan, arah dan pedoman pelaksanaan pengembangan smart city;
2. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan smart city di Kota Bogor;
3. Memberikan kemudahan bagi kegiatan-kegiatan pengembangan smart city;
4. Mendorong kegiatan smart city untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan efektif;

5. Menjamin keberlangsungan program smart city yang tetap berwawasan lingkungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi, masalah masih ditemukan dalam pelaksanaan perencanaan induk pengembangan e-Government di Kota Bogor, yaitu :

1. Peraturan Daerah yang mengatur tentang regulasi penyelenggaraan e-Government hingga saat ini masih dalam tahap Rancangan Peraturan Daerah.
2. Dibatalkannya Rancangan Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan e-Government, karena dinaikkan statusnya menjadi Rancangan Peraturan Daerah.

Akibatnya, hingga saat ini Kota Bogor belum memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan dasar penyelenggaraan e-Government yang bertujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK yang terdiri dari:

- a) Manajemen/proses kebijakan (terkait TIK) yang dilaksanakan.
- b) Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya.
- c) Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, atau bentuk dokumen resmi lainnya.
- d) Standardisasi atau panduan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan TIK secara umum maupun secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu.
- e) Peraturan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan program pengembangan dan pemanfaatan TIK.
- f) Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan suatu daerah.
- g) Evaluasi/manajemen risiko TIK

Dari segi kelembagaan, yang melingkupi personil, satuan organisasi, pembiayaan, dan peralatan, telah dilakukan upaya penguatan dengan jalan :

- Peningkatan status perangkat daerah pelaksana fungsi informasi dan komunikasi daerah, dari bentuk Kantor menjadi Dinas tipe A dengan perluasan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana
- Telah dibentuk organisasi fungsional Dewan smart City Kota Bogor yang dipimpin langsung oleh kepala daerah untuk fungsi yang menentukan

kebijakan dan monev pengembangan smart City serta ditunjang oleh Tim Pelaksana Smart City.

- Kantor Diskominfo saat ini belum mengontrol sepenuhnya atas pengembangan dan pemanfaatan TIK serta kontrol anggaran secara terintegrasi, dikarenakan belum optimalnya kewenangan yang diberikan. sehingga belum mampu menyediakan e-government yang efektif dan efisien dilingkungan Pemerintah Kota Bogor. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan TIK di Pemkot Bogor sangat penting sebagaimana diamanahkan dalam pengembangan e-government yang bertujuan untuk efisien dan efektifnya kinerja pemerintahan dengan pemanfaatan TIK.
- Semangat membangun sistem informasi di OPD sudah sedemikian maju pesatnya akan tetapi masih belum di akomodasi oleh kantor Kominfo, bahkan di beberapa OPD sudah akan mulai membangun sistem terintegrasi, perlu segera dibuat kebijakan dimana kantor Kominfo mampu mengontrol semua aktifitas pengembangan dan pemanfaatan TIK di Pemkot Bogor.
- Karyawan pemerintah kota Bogor yang berlatar belakang TIK sekitar 70 orang, akan tetapi yang termanfaatkan optimal untuk pekerjaan terkait TIK tidak lebih dari 20 orang. SDM yang dikelola oleh Kantor Kominfo masih jauh dari mencukupi untuk mengelola TIK di seluruh OPD, sehingga banyak pekerjaan yang semestinya dikerjakan sendiri karena alasan keamanan informasi dengan terpaksa dilaksanakan oleh pihak ketiga selain itu OPD perlu mengelola sendiri SDM TIKnya, padahal OPD tidak mempunyai tupoksi pengelolaan TIK, sehingga kegiatan pengembangan dan pengelolaan TIK di OPD non Kominfo tidak bisa didanai langsung oleh OPD bersangkutan, hal ini beresiko pada penyalahgunaan administratif untuk mendukung kegiatan terkait TIK yang tetap saja merupakan kesalahan didepan hukum.
- Pelatihan teknis masih belum memadai hal ini beresiko pada kurang optimalnya layanan infrastruktur TIK

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output	Outcome
<b>A</b>	<b>Dimensi Kebijakan</b>				
1	Penetapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan egovernment/TIK terintegrasi	Program Pengembangan Kelembagaan TIK	Penyusunan regulasi pelaksanaan eGovernment	Perwali	Panduan hukum implemmentasi egovernment

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output	Outcome
			Penyusunan regulasi rencana Induk e-Government	Perwali	Panduan teknis impelementasi egovernment
			Penyusunan regulasi metadata dan interoperabilitas data	Perwali	Panduan teknis hukum dan teknis standardisasi data elektronik pemerintah kota
			Penyusunan regulasi pengembangan dan pemanfaatan sarana TIK terpadu	Perwali	Panduan teknis hukum dan teknis pengembangan dan pemanfaatan sarana TIK pemerintah kota
			Penyusunan regulasi pengembangan dan pemanfaatan prasarana TIK terpadu	Perwali	Panduan teknis hukum dan teknis pengembangan dan pemanfaatan prasarana TIK pemerintah kota
			Penyusunan regulasi pengelolaan aset maya daerah	Perwali	Panduan teknis hukum dan teknis pengelolaan aset informasi daerah pemerintah kota
			Penyusunan SOP Pengelolaan Aplikasi dan Web	Perwali	Panduan Teknis pengelolaan Website dan subdomain khas pemerintah kota
			Penyusunan SOP Pengelolaan Sarana TIK	Perwali	Panduan Teknis pengelolaan Sarana TIK pemerintah kota
			Penyusunan SOP Pengelolaan Prasarana TIK	Perwali	Panduan Teknis pengelolaan Prasarana TIK pemerintah kota
			Penyusunan kebijakan keamanan informasi	Perwali	Panduan Hukum pengelolaan Keamanan Data / informasi pemerintah kota

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output	Outcome
			Penyusunan SOP Keamanan Data	Perwali	Panduan Teknis pengelolaan Keamanan Data pemerintah kota
			Penyusunan SOP Keamanan Jaringan	Perwali	Panduan Teknis Keamanan Jaringan
			Penyusunan SOP Incident Handling	Perwali	Panduan Teknis Incident Handling
			Penyusunan SOP Pengelolaan Data Center	Perwali	Panduan Teknis Pengelolaan Data Center
2	Pemanfaatan TIK pada proses birokrasi	Program Pengembangan Kelembagaan TIK	Penyusunan regulasi otomatisasi proses birokrasi	Perwali	Peningkatan kinerja PNS pemko dan peningkatan layanan Pemko pada masyarakat dan dunia usaha
3	Penetapan alat kontrol dan monitoring tingkat pemanfaatan TIK disemua unit kerja pemkot	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama TIK	Audit TIK Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi kinerja implementasi eGovernment	Dokumen Audit Dokumen self assessment	Percepatan dan ketepatan implementasi eGovernment
<b>B</b>	<b>Dimensi Kelembagaan</b>				
1	Perlunya pendampingan oleh pihak ketiga untuk pengembangan TIK dan beberapa operasional infrastruktur TIK	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama TIK	Pendampingan tatakelola egovernment	Dokumen	
			Pendampingan Infrastruktur TIK dan keamanan informasi	Dokumen	

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output	Outcome
			Pendampingan pengembangan aplikasi e-Government terintegrasi	Dokumen	
2	Pembentukan Organisasi Fungsional pada tataran strategis (CIO/Dewan TIK)	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Pembentukan CIO / Dewan TIK	Organisasi fungsional	Pengaruh kebijakan TIK
3	Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-government kepada level eksekutif	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-govt kepada level eksekutif dan legislatif	Sosialisasi dan pendampingan	Pemahaman eGovernment bagi Top level management secara berkelanjutan
4	Restrukturisasi OPD Kominfo	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama TIK	Restrukturisasi - Posisi eselon - Fungsi pengembangan TIK	Reorganisasi	Efisiensi dan efektifitas implementasi egovernment
5	Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelola TIK di semua OPD serta pendistribusiannya	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Pengadaan SDM TIK Pelatihan TIK Distribusi SDM TIK Karir Kesejahteraan	Revitalisasi SDM	Efisiensi dan efektifitas implementasi egovernment
6	Pembentukan Jabatan Fungsional SDM pengelola TIK dan Kebijakan legalitas pengelola TIK di OPD	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Kebijakan Pembentukan Jabatan Fungsional SDM pengelola TIK dan Kebijakan legalitas pengelola TIK di OPD	Perwali	Efisiensi dan efektifitas implementasi egovernment

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output	Outcome
7	Pembentukan fungsi kerja TIK sebagai Helpdesk dan monitoring jaringan OPD	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama TIK	Restrukturisasi OPD Kominfo	Revitalisasi fungsi pengelola TIK	Efisiensi dan efektifitas implementasi egovernment

### RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SMART CITY

C	Dimensi Infrastruktur				
1	Pengelolaan infrastruktur TIK di OPD	Pengelolaan Sarana dan Prasarana TIK	Kegiatan rutin pengadaan, pemeliharaan infrastruktur TIK	Pemeliharaan rutin	
2	Percepatan penyediaan jaringan backbone menggunakan Fiber Optic yang menjangkau seluruh OPD sampai dengan tingkat kelurahan/puskesmas	Pengembangan Sarana dan Prasarana TIK	Peningkatan layanan infrastruktur TIK untuk semua OPD, kecamatan dan kelurahan / puskesmas	Jaringan Backbone Fiber Optik  Optimasi Jaringan distribusi ke kelurahan dan puskesmas	Peningkatan layanan infrastruktur TIK
3	Percepatan pengembangan dan pengelolaan Datacenter dan Data recovery	Pengembangan Sarana dan Prasarana TIK	Pembangunan data center dan pengadaan sewa data recovery oleh pihak ketiga	Peningkatan layanan infrastruktur internal	Peningkatan jaminan availability akses dan pengamanan informasi
4	Pengembangan intranet untuk komunikasi antar OPD	Pengembangan Sarana dan Prasarana TIK	Pengadaan perangkat komunikasi berbasis intranet	Aplikasi komunikasi	Peningkatan kinerja PNS dan layanan masyarakat
5	Manajemen bandwidth, IP dan pemanfaatan akses internet untuk seluruh OPD	Pengelolaan Sarana dan Prasarana TIK	Kegiatannya Mengacu pada kegiatan penyusunan SOP pengamanan informasi	Pelaksanaan manajemen keamanan informasi	Implementasi SOP pengamanan informasi

Tabel 8. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City

**RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PERANGKAT LUNAK  
PENDUKUNG SMART CITY**

D	Dimensi Aplikasi				
1	Penyusunan Tatakelola data / informasi yang terintegrasi dalam kerangka interoperabilitas	Pengembangan Aplikasi dan Data Eletronik	Pemetaan data OPD dan koordinasi Pengelolaan Data	Peta dan inventarisasi Data Pemkot	Pelaksanaan kebijakan data tunggal pemkot
2	Sentralisasi data dan informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data di OPD	Pengembangan Aplikasi dan Data Eletronik	Backup Data OPD dan koordinasi Pengelolaan Data	Pengamanan data pemkot	Pelaksanaan kebijakan pengamanan data pemerintah
3	Standardisasi metadata untuk pengembangan	Pengembangan Aplikasi dan Data Eletronik	Penyusunan standar metadata OPD	Inventarisasi standar metadata	Acuan penyusunan aplikasi pengolahan data pemerintah kota
	aplikasi dan pengelolaan data tunggal dalam rangka interoperabilitas.		dan koordinasi Pengelolaan Data		
4	Pemanfaatan Open Source Software digunakan untuk pengembangan aplikasi dan Operating system server, sedangkan untuk klien/ desktop menggunakan software Legal	Pengembangan Aplikasi dan Data Eletronik	Pengadaan software proprietary untuk klien Migrasi aplikasi yang menggunakan Operating system proprietary menjadi opensource	Jumlah software proprietary legal untuk terminal Jumlah aplikasi berbasis proprietary yang dimigrasikan	Legalitas kepemilikan aset milik negara mendukung peningkatan kemandirian bangsa



5	Pengembangan aplikasi egovernment, setiap OPD memiliki sistem informasi baik untuk layanan masyarakat (G2C), dunia usaha (G2B) maupun layanan internal (G2E), sesuai dengan prioritas kebutuhan secara bertahap	Pengembangan Aplikasi dan Data Eletronik	Pengembangan aplikasi e-Government klaster Administrasi dan manajemen umum Klaster keuangan Klaster pembangunan Klaster layanan masyarakat Klaster kepegawaian Klaster legislasi	Aplikasi e-Government klaster Administrasi dan manajemen umum Klaster keuangan Klaster pembangunan Klaster layanan masyarakat Klaster layanan masyarakat Klaster kepegawaian Klaster legislasi	Smart Government
6	Redevelopment web Kota Bogor dan sub domain web OPD yang terintegrasi	Pengembangan Aplikasi dan Data Eletronik	Pengembangan webste	Pengembangan webste	
<b>E</b>	<b>Dimensi Perencanaan</b>				
1	Penetapan dokumen Rencana Pengembangan eGovernment melalui Perwali	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Koordinasi dan Komunikasi, Fokus Group Discusion, Sosialisasi, pengarahan pimpinan daerah (Sekda / Walikota)	Kesepakatan dan Draft Perwali ttg eGovernment	Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar OPD tentang pengembangan egovernmentn
2	Penyusunan dokumen action plan untuk setiap kegiatan TIK yang berdampak luas terhadap kinerja OPD	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Penyusunan dokumen action plan pengembangan datawarehouse dan standardisasi metadata	Dokumen Action Plan (Program Manual kegiatan)	Pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan egovernmentn

3	Penyusunan Business Continuity Plan untuk layanan infrastruktur TIK	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Penyusunan Dokumen Business Continuity Plan untuk layanan infrastruktur TIK	Dokumen Business Continuity Plan untuk layanan infrastruktur TIK	Pedoman pelaksanaan layanan infrastruktur TIK dan cara pelaksanaan apabila terjadi insiden
4	Rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh OPD dari OPD Kominfo.	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Penyusunan dokumen petunjuk teknis / standar biaya kegiatan terkait pengembangan TIK	Dokumen petunjuk teknis / standar biaya kegiatan terkait pengembangan TIK	Pedoman belanja dan kegiatan terkait pengembangan e-government

Tabel 9. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City

## RENCANA PENGUATAN LITERASI SMART CITY

Tabel 10. Rencana Penguatan Literasi Smart City

F	Dimensi Informasi				
	Pengembangan kualitas dan kuantitas penyediaan informasi pembangunan melalui PPID	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Koordinasi dan konsolidasi penetapan dokumen standar informasi publik	Dokumen standar layanan informasi publik	Pedoman layanan informasi publik
	Pembinaan pemanfaatan TIK oleh masyarakat dan dunia usaha	Program Pembinaan dan Pengendalian Telekomunikasi dan Informatika	Bimbingan teknis pada UMKM untuk memanfaatkan TIK	Bimbingan teknis	Peningkatan kewirausahaan berbasis elektronik
	Pengembangan sistem complaint resolution pembangunan Kota Bogor	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembangunan aplikasi keluhan warga dan forum diskusi warga	Modul keluhan warga dan forum diskusi warga	Peningkatan peran serta warga dalam membangun kota Bogor

MASTERPLAN SMART CITY DAERAH

*smart city*

KOTA BOGOR

# ROAD MAP JANGKA MENENGAH E-GOV DAN SMART CITY



# ROAD MAP STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

Master Plan e-Gov 2014-2018

IRISAN

Masterplan Smart City 2017-2021

**DIMENSI**

2017

2018

2019

2020

2021

D I M E N S I	2017	2018	2019	2020	2021
<b>DIMENSI KEBIJAKAN</b>					
Penetapan Peraturan	Penyusunan Perda	Penyusunan Perwali dan S.O.P Pelaksanaan Perda			
Pemanfaatan TIK pada proses birokrasi		Perwali e-Birokrasi			
Penetapan alat kontrol dan monitoring tingkat pemanfaatan TIK disemua unit kerja pemkot		Audit Sistem T.I.K. & Indeks e-Gov	Indeks e-Gov	Indeks e-Gov	Indeks e-Gov
<b>DIMENSI KELEMBAGAAN</b>					
Perlunya pendampingan oleh pihak ketiga untuk pengembangan TIK dan beberapa operasional infrastruktur TIK		Pendampingan Tata Kelola, Infrastruktur dan Pengembangan Aplikasi Terintegrasi e-Government			

<b>DIMENSI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pembentukan Organisasi Fungsional pada tataran strategis (CIO/Dewan TIK)	Pembentukan CIO/ Dewan Smart City				
Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government kepada level eksekutif	Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-govt kepada level eksekutif	Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-govt kepada level legislatif			
Restrukturisasi OPD Kominfo	Restrukturisasi - Posisi eselon - Fungsi pengembangan TIK				
Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelola TIK di semua OPD serta pendistribusiannya	Pengadaan SDM TIK, Pelatihan TIK, Distribusi SDM TIK, Peningkatan Karir dan Kesejahteraan SDM TIK				
Pembentukan Jabatan Fungsional SDM pengelola TIK dan Kebijakan legalitas pengelola TIK di OPD	Kebijakan Pembentukan Jabatan Fungsional SDM pengelola TIK dan kebijakan legalitas pengelola TIK di OPD				
Pembentukan fungsi kerja TIK sebagai Helpdesk dan monitoring jaringan OPD	Restrukturisasi OPD Kominfo dan Optimalisasi Help Desk dan Monitoring Jaringan OPD				

<b>DIMENSI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>DIMENSI INFRASTRUKTUR</b>					
Pengelolaan infrastruktur TIK di OPD	Kegiatan rutin pengadaan, pemeliharaan infrastruktur TIK				
Percepatan penyediaan jaringan backbone menggunakan Fiber Optic yang menjangkau seluruh OPD sampai dengan tingkat kelurahan/ puskesmas	Peningkatan layanan infrastruktur TIK untuk semua OPD, kecamatan dan kelurahan / puskesmas				
Percepatan pengembangan dan pengelolaan Data Center dan Data recovery center		DED Data Center dan Sewa Data Recovery Center	Pembangunan/ Revitalisasi Data Center		
Pengembangan intranet untuk komunikasi antar OPD	Pengadaan perangkat komunikasi berbasis intranet		Pengadaan perangkat komunikasi berbasis intranet		
Manajemen bandwidth, IP dan pemanfaatan akses internet untuk seluruh OPD	Pelayanan akses internet, website, domain, dan pengalokasian bandwidth				
<b>DIMENSI APLIKASI</b>					
Penyusunan tatakelola data / informasi yang	Pemetaan data OPD dan Koordinasi Pengelolaan Data				

<b>DIMENSI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
terintegrasi dalam Kerangka interoperabilitas					
Sentralisasi data dan informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data di OPD	Backup Data OPD dan Koordinasi Pengelolaan Data				
Standardisasi metadata untuk pengembangan aplikasi dan pengelolaan data tunggal dalam rangka interoperabilitas.		Penyusunan standar metadata OPD dan koordinasi Pengelolaan Data			<b>Review Standar Metadata OPD</b>
Pemanfaatan Open Source Software digunakan untuk pengembangan aplikasi dan Operating system server, sedangkan untuk clien/desktop menggunakan software Legal	Pengadaan software proprietary untuk klien Migrasi aplikasi yang menggunakan Operating system proprietary menjadi opensource				
Pengembangan aplikasi egovernment, setiap OPD memiliki sistem informasi baik untuk layanan masyarakat (G2C), dunia usaha (G2B) maupun layanan internal (G2E), sesuai dengan prioritas kebutuhan secara bertahap	Pengembangan aplikasi e- Government klaster Administrasi dan manajemen umum, dan Klaster keuangan,	<b>Pendampingan</b>	<b>Pendampingan</b>	Pengembangan aplikasi e- Government Klaster Pembangunan, Klaster layanan masyarakat, Klaster Kepegawaian, Klaster legislasi	<b>Pendampingan</b>



<b>DIMENSI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Redevelopment web Kota Bogor dan sub domain web OPD yang terintegrasi	Pengembangan webste				
<b>DIMENSI PERENCANAAN</b>					
Penetapan dokumen Rencana Pengembangan eGovernment melalui Perwali	Penyusunan Perwali terkait tata laksana e-Government	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Review Perwali terkait Tata laksana e-Government
Penyusunan dokumen action plan untuk setiap kegiatan TIK yang berdampak luas terhadap kinerja OPD	Penyusunan dokumen action plan pengembangan datawarehouse				<b>Review</b> dokumen action plan pengembangan datawarehouse
	Manajemen Inovasi Daerah				
Penyusunan Business Continuity Plan untuk layanan infrastruktur TIK			Penyusunan Dokumen Business Continuity Plan untuk layanan Infrastruktur TIK		
Rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh OPD dari OPD Kominfo.	Penyusunan petunjuk teknis / standar biaya kegiatan terkait pengembangan TIK		Review petunjuk teknis / standar biaya kegiatan terkait pengembangan TIK		
<b>DIMENSI INFORMASI</b>					
Pengembangan kualitas dan kuantitas penyediaan	Koordinasi dan konsolidasi penetapan				

<b>DIMENSI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
informasi pembangunan melalui PPID	dokumen standar informasi publik				
Pembinaan pemanfaatan TIK oleh masyarakat dan dunia usaha		Bimbingan teknis pada UMKM untuk memanfaatkan TIK		Bimbingan teknis pada UMKM untuk memanfaatkan TIK	
Pengembangan sistem complaint resolution pembangunan Kota Bogor	Pembangunan aplikasi keluhan warga dan forum diskusi warga				

## Matriks Rencana Aksi *Quick Wins* Pengembangan Smart City Kota Bogor Tahun 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA AKHIR	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
1.	Meningkatnya Layanan Kesehatan	Persentase Penggunaan SIMPUS	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas Yang Mengimplementasikan SIM Puskesmas (%)	Implementasi SIMPUS	26 Puskesmas	14	12	-	-	-	26 Puskesmas (100%)	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.		Persentase Penggunaan Layanan Rujukan elektronik (eSIR)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Optimalisasi pemanfaatan e-SIR di Kota Bogor	Digunakannya e-SIR oleh Tenaga Kesehatan dan RS di Kota Bogor	10%	25%	50%	75%	100%	26 Puskesmas dan 18 Rumah Sakit	Kesehatan	Dinas Kesehatan

## Matriks Road Map Pengembangan Smart City Kota Bogor Tahun 2017-2021

### Dimensi : Smart Governance

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					BIDANG URUSAN	PD	
								2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat Online Terintegrasi	Mengintegrasikan layanan publik berbasis online Menata layanan berbasis web yang user friendly	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah ruang publik yang disediakan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	Pengembangan Infrastruktur jaringan F.O kota	Tersambungnya 59 titik dari total 128 titik, 69 sudah tersambung FO	-	20	20	19	-	Komunikasi dan Informatika	Diskom infostandi	
2.		Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas OPD (%)		Integrasi Aplikasi	Terintegrasinya 40 Aplikasi	50%	75%	100%	-			-
3.		Persentase inovasi masyarakat yang berhasil diimplementasikan untuk menunjang visi misi Kota Bogor	Mendata inovasi dari stakeholders Mengembangkan inovasi melalui manajemen inovasi	Penelitian dan Pengembangan	Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan	Lomba inovasi TIK daerah	Terlaksananya lomba inovasi TIK tahunan daerah	-	1	1	1	1			Komunikasi dan Informatika
4.	Meningkatnya Efisiensi Manajemen Birokrasi Pemerintah	Indeks Penyelenggaraan e-Government	meningkatkan prasarana dan sarana e-government meningkatkan	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah ruang publik yang disediakan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	Pembangunan WiFi ruang publik	115 Titik WiFi, sudah terpasang 35 titik	-	20	20	20	20	Komunikasi dan Informatika	Diskom infostandi	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					BIDANG URUSAN	PD
								2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			kualitas tata kelola e-government menata dan menguatkan biokrasi dan kelembagaan ternasuk organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur menata dan menguatkan ekosistem e-government											
5.	Meningkatnya Keterlibatan Publik Dalam Manajemen Kebijakan Publik	Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan	Mereview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK)	Penelitian dan Pengembangan	Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan/revisi rencana pembangunan jangka menengah kelurahan	Revisi RPJMK	Terlaksananya revisi RPJMK 68 Kelurahan	-	34	34	-	-	Perencanaan	Bappeda

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					BIDANG URUSAN	PD
								2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang											
6.		Persentase Masyarakat Yang Mengakses Website Kota Bogor	Meningkatkan desain website. Menjadikan website kota bogor sebagai sumber rilis informasi kegiatan perangkat daerah	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah pengunjung website Kota Bogor	Pengembangan Website Portal Satu Data Kota Bogor	Terwujudnya Portal Satu Data	-	25%	50%	75%	100%	Komunikasi dan Informatika	Diskom infostandi

## DIMENSI : SMART BRANDING

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
1.	Berkembangnya Ekosistem Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (%)	Pengadaan Penanda Unik Wisata	Penanda Unik 15 Lokasi Wisata	-	-	5	5	5	Menata penanda wisata, rambu wisata yang unik Mewujudkan informasi wisata digital (berbasis TIK) Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata Mengembangkan strategi pemasaran baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional	Pariwisata	DisparbudEkraf, Dinas Perhubungan, Diskominfostand i
2.	Meningkatnya jumlah pelaksanaan Event/Festival Ekonomi kreatif	Jumlah Event Ekonomi Kreatif	Pengembangan Event/festival dan subsektor ekonomi kreatif	Bertumbuhnya pelaku ekonomi kreatif baru	Pengembangan Subsektor Ekonomi kreatif berbasis media Event/festival	29 Festival/ events	3	5	6	7	8	Meningkatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan dan mendorong berkembangnya ekonomi kreatif	Pariwisata dan keuangan	DisparbudEkraf
3.			Pengelolaan Keragaman	Persentase Pelaku seni budaya (Komunitas dan	Pementasan Seni Budaya	3 Pementasan	-	-	1	1	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pementasan seni	Kebudayaan	DisparbudEkraf

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
			Budaya	sanggar) yang aktif		Budaya Skala Nasional								
4.		Persentase Pengembangan Kampung Kreatif	Pengembangan pemasaran pariwisata	Peningkatan UKM masyarakat lokal berbasis komunitas	Pembangunan Kampung Kreatif	12 Kampung Kreatif	1	3	3	3	2	Mendorong masyarakat untuk kreatif di bidang ekonomi dan pariwisata Mendorong masyarakat untuk mengangkat potensi wilayahnya yang dapat memberikan dampak perekonomian	Pariwisata	Kecamatan, Dinas KUKM, Disparbudekraf
5.	Terciptanya Wajah Kota Dengan Tata Ruang Yang Berkualitas	Persentase Taman Kota Tematik Yang Berkualitas	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Taman, jalur hijau, dan furniture hijau Kota lainnya yang dibangun (Ha) dan ditingkatkan kualitasnya (Ha)	Pembangunan, Revitalisasi dan Pemeliharaan taman kota	2 Taman Baru, dan 6 Taman eksisting	-	2 Taman baru	2 Revitalisasi Taman eksisting	2 Revitalisasi Taman eksisting	2 Revitalisasi Taman eksisting	Mewujudkan taman kota yang nyaman, aman dan layak bagi anak, pemuda dan lansia. Meningkatkan layanan publik wifi yang mengedukasi user	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Dinas Perumahan
6.		Persentase Preservasi Bangunan Kota Pusaka	Pelestarian bangunan cagar budaya	Jumlah bangunan cagar budaya yang dipelihara	Revitalisasi bangunan cagar budaya	Revitalisasi 3 unit Bangunan Cagar Budaya	-	-	1	1	1	Menerakan papan informasi nilai sejarah pada bangunan-bangunan kota pusaka Mengoptimalkan kualitas kondisi bangunan cagar budaya	Kebudayaan	Disparbudekraf



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
7.		Jumlah Navigasi Unik Kota Bogor Berbasis Aplikasi, Virtual/ Augmented	Pengembangan pemasaran pariwisata	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	Pembuatan info wisata dan kuliner dalam Instant Apps	1 Aplikasi Bogor Tourism Instant Apps	-	-	1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan pola navigasi wisata digital</li> <li>• Mengembangkan sistem promosi non data berbasis instant apps</li> </ul>	Komunikasi dan informatika	Diskominfo

## DIMENSI : SMART ECONOMY

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
1.	Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Pelayanan Berbasis TIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pajak Daerah dan Perijinan	Penataan Tata Laksana	Persentase OPD yang menetapkan Standar pelayanan publik (%)	Pengembangan (sistem layanan perijinan) SMART	Terlaksananya pengembangan aplikasi SMART	-	-	1	-	-	Mengembangkan sistem layanan berbasis elektronik untuk menekan kebocoran dan mengoptimalkan pendapatan	Penanaman modal	Bapenda, DPMPSTP
2.				Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Manajemen Inovasi Daerah	Terdatanya dan Terbinanya 21 Inovasi Daerah berdasarkan manajemen inovasi	-	5	5	6	5	Mengoptimalkan layanan manajemen inovasi	Administrasi pemerintahan	Semua OPD
3.		Tingkat Okupansi Kios Pada 5 Pasar Besar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada 5 Pasar	Nilai IKM sebesar 90%	-	75	80	85	90	Mengoptimalkan penerapan regulasi, layanan prasarana dan sarana pasar yang berkualitas	Perdagangan	PD Pasar
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Angka Kemiskinan	Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	Prosentase KK miskin yang meningkat pendapatannya	Pelatihan Manajemen Keuangan kepada pengurus UP2K	68 UP2K Kelurahan	-	11	57	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memperbaiki program perlindungan sosial</li> <li>✓ Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan</li> </ul>	Sosial	Dinas Sosial

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
												dasar ✓ Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin		
5.		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Jumlah jenis produk wirausaha baru yang terserap pasar	Pelatihan TIK dan pemberian bantuan sarana usaha kepada UKM	30 UKM Kreatif di Kota Bogor	-	-	10	10	10	✓ Meningkatkan pelatihan kewirausahaan yang menghasilkan lapangan pekerjaan yang produktif ✓ Meningkatkan peluang usaha bagi pengusaha kecil dengan jaminan pasar dan harga	Koperasi dan UMKM	Dinas KUKM, Dinas Perindag
6.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Transaksi "non Tunai" Berbasis Perbankan	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan	Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Transaksi Non Tunai	1 Perwali	-	1	-	-	-	Menata dan meningkatkan transaksi non tunai dalam realisasi anggaran pemerintah	Administrasi pemerintahan	BPKAD
7.		Persentase Transaksi Berbasis Uang Elektronik	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan	Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Transaksi	1 Perwali	-	1	-	-	-	Mengembangkan sistem pembayaran/transaksi non tunai di lingkungan badan usaha milik daerah	Keuangan	BPKAD

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
			Daerah		Non Tunai									
8.			Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Tingkat tertib administrasi pengelolaan aset daerah	Optimalisasi Sistem Aplikasi Penatausahaan Persediaan	34 Perangkat Daerah	-	34	-	-	-		Keuangan	

## DIMENSI : SMART LIVING

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
1.	Terkendalinya Tata Ruang Kota Bogor	Konsistensi Pemanfaatan Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang	Jumlah regulasi penataan ruang (perda/perwali)  Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang	- Penyusunan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi -Updating Peraturan tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Saluran (GSS) - Penyusunan Data Base Jalan dan SK Jalan Perumahan	2 regulasi penataan ruang (perda/perwali)	1	2	2	-	Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang dengan alat system informasi	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumkim

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
2.					Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	1 sistem informasi	1	1	1	1	1	Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penegasan aturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang dengan alat system informasi		
3.			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Pengembangan konten akses dan komunikasi masyarakat pada tata ruang berbasis web	1 sistem informasi	1	1	1	1	1	Mempermudah akses informasi tata ruang kepada masyarakat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bappeda
4.		Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Perencanaan Tata Ruang	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan	Pembuatan dan Pengembangan Portal	1 Sistem	1	1	1	1	1	Mengembangkan rencana kawasan di masa depan dengan desain integratif dan	Perencanaan	Dinas PUPR, Bappeda

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
				Tata Ruang	Informasi Geospasial Kota Bogor							berwawasan lingkungan		
					Penyusunan RDTR	1 dokumen	1	-	-	-	-			
					Penyusunan RTBL TOD Bogor	5 dokumen	1	1	1	1	1			
5.	Meningkatnya Layanan Kesehatan	Persentase Penggunaan SIMPUS	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Puskesmas Yang Mengimplementasikan SIM Puskesmas (%)	Implementasi SIMPUS	26 Puskesmas	14	12	-	-	-	Mengembangkan aplikasi SIMPUS dan mengimplementasikannya secara optimal pada 26 Puskesmas	Kesehatan	Dinas Kesehatan
6.		Persentase Penggunaan Layanan Kesehatan Berbasis Web	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas	Persentase Puskesmas Yang Mengimplementasikan Pendaftaran Online (%)	Pembuatan Aplikasi Pendaftaran Online Puskesmas	1 Aplikasi	100%	-	-	-	-	Mengembangkan aplikasi Pendaftaran online yang merujuk pada sistem pendaftaran BPJS dan mengimplementasika	Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
			Pembantu dan Jaringannya									nya secara optimal pada 26 Puskesmas		
7.					Implementasi Aplikasi Pendaftaran Online Puskesmas	26 Puskesmas	-	26	-	-	-	26 Puskesmas (100%)	Kesehatan	Dinas Kesehatan
8.		Persentase Penggunaan Layanan Rujukan elektronik (eSIR)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Optimalisasi pemanfaatan e-SIR di Kota Bogor	Digunakan nya e-SIR oleh Tenaga Kesehatan dan RS di Kota Bogor	10%	25%	50%	75%	100%	Mengembangkan dan menyebarluaskan penggunaan e-SIR di seluruh Puskesmas dan praktek bidang persalinan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
9.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum, Prasarana dan Sarana Transportasi	Persentase Konversi Angkutan Umum berbasis Minibus ke Bis Kecil	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah koridor Bus Trans Pakuan  Jumlah Trayek Feeder	Rerouting Angkutan Dalam Kota	Konversi 300 Angkot menjadi 100 Mikrobis	-	-	100	100	100	Mengembangkan layanan jasa transportasi yang berkualitas	Perhubungan	Dinas Perhubungan, PD Transportasi
10.		Persentase tingkat kondisi jalan kota yang baik dan sedang  Persentase	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang ruas jalan utama (Arteri, Kolektor & Lokal) terbangun sesuai arahan RTRW	Kegiatan Pembangunan Jalan	Tersedianya sarana transportasi dengan bertambahnya	270.418	271.418	272.018	-	-	Mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur sesuai arahan rencana tata	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		Pembangunan Jalan R3, Bogor		2011 – 2031 (km)		panjang jalan maupun akses jalan baru						ruang		
11.		Persentase ketersediaan sistem informasi	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base	Persentase tersedianya sistem informasi	Pembangunan Sistem Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7 Aplikasi	2 Aplikasi	5 Aplikasi	-	-	-	Mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur sesuai arahan rencana tata ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR
12.		Persentase Angkutan Umum yang Konversi dari BBM ke BBG	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase angkutan umum yang menggunakan BBG	Konversi BBM ke BBG	100 Angkot	-	25	25	25	25	Mengupayakan percepatan konversi dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung	Perhubungan	Dinas Perhubungan
13.		Persentase Penggunaan e-Money (pembayaran non tunai)	Pengembangan infrastruktur jaringan internet pada pasar tradisional	Jumlah toko yang menerima transaksi non tunai pada 5 pasar besar	Pilot Project Toko Non Tunai	10 Toko	-	-	5	5	-	Mengembangkan sistem pembayaran angkutan umum secara non tunai	Perdagangan	Dinas Perindag, PD Pasar
14.		Persentase Pedestrian Yang	Pembangunan Prasarana	Panjang prasarana	Kegiatan Pembangunan	Tersedia-nya	15,107	19,961	24,813	-	-	Menata dan mengupayakan	Pekerjaan Umum dan	Dinas PUPR

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		Berkualitas dan Pro Disabilitas	Pedestrian dan Pesepeda	pedestrian yang meningkat kapasitasnya (pelebaran prasarana pedestrian) (km)	an Trotoar Per Wilayah	pedestrian yang berkondisi baik dan layak bagi pejalan kaki						percepatan pembangunan pedestrian pada kawasan strategis	Penataan Ruang	
15.				Panjang prasarana pedestrian jalan utama terbangun (km)	Kegiatan Pembangunan Trotoar Per Wilayah	Tersedia-nya pedestrian yang berkondisi baik dan layak bagi pejalan kaki	260,762	266,952	271,062	-	-	Menata dan mengupayakan percepatan pembangunan pedestrian pada kawasan strategis	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR

## DIMENSI : SMART SOCIETY

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
1.	Meningkatnya Interaksi Sosial Masyarakat	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kepeloporan, Kewirausahaan, Jambore Pemuda dan Jambore Komunitas	Peningkatan peran pemuda dan komunitas	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan pemuda pelopor, pemuda wirausaha, pertukaran pemuda antar negara, jambore pemuda dan jambore komunitas	Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan	Terselenggaranya : Pemuda Pelopor, Pemuda Wirausaha, PPAN, Jambore Pemuda dan Jambore Komunitas dan Sosialisasi Anti Narkoba	400 org	400 org	400 org	400 org	400 org	Meningkatkan peran serta kepemudaan dalam kegiatan pemuda pelopor, pemuda wirausaha, pertukaran pemuda antar negara, jambore pemuda dan jambore komunitas serta sosialisasi Anti Narkoba	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
2.	Meningkatnya nilai-nilai kebhinekaan dan harmonisasi antar umat beragama, antar suku, ras, dan golongan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Event Sosial, Olahraga, Seni dan Budaya	Peningkatan peran pemuda dan komunitas	Jumlah pemuda dan pelajar yang terlibat dalam event Sosial, Olahraga, Seni dan Budaya	Pembangunan Auditorium dan Lab TIK Pemuda	Terbangunnya 1 unit Auditorium dan Laboratorium Pemuda dan Olahraga	-	-	-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan peran serta Kota Bogor dalam O2SN, POPWIL, POPDA, POSPEDA, POSPENAS, dan Olahraga Tradisional</li> <li>Menata, merenovasi dan</li> </ul>	Kepemudaan dan Olahraga	Dispora

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
												mengembangkan gelanggang olahraga dan pemuda Kota Bogor		
3.	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang T.I.K	Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Yang Menyelenggarakan e-Learning	Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pendidik PAUD, SD, SMP yang memiliki kompetensi e-learning (%)  Persentase jumlah PAUD, SD, SMP yang menyelenggarakan e-learning	Sosialisasi Smart City dan Pelatihan e-Learning	Pelatihan e-Learning bagi 1000 Guru	-	250	250	250	250	Mengembangkan metodologi e-learning bagi anak Usia Dini, SD dan SMP Mengupayakan peningkatan kesadaran pemanfaatan gawai dan internet secara positif dan produktif	Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.		Jumlah Kegiatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Dengan Stakeholders Relawan TIK	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kampanye berinternet sehat dan produktif	Sosialisasi dan Kampanye Berinternet sehat dan Produktif	20 kegiatan	-	5	5	5	5	Mengkampanyekan cara bersosial media secara cerdas, sehat, dan anti diskriminasi sara	Komunikasi dan informatika	Diskominfo
5.	Meningkatnya Layanan Kebencanaan	Persentase Kelurahan Siaga Bencana	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang diintervensi	Penguatan Kapasitas Penanggulangan Kebencanaan Masyarakat Kelurahan	68 kelurahan	-	34	34	-	-	Menata dan mengembangkan pembentukan kelurahan siaga bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan	BPBD

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
													Masyarakat	
6.		Jumlah Sosialisasi Mitigasi Cerdas Kebencanaan	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah kelompok masyarakat (stakeholders kebencanaan) yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan kebencanaan	Pelatihan Mitigasi Kebencanaan	20 Sekolah, 8 gedung, 8 pasar	2 gedung	5 sekolah, 2 gedung, 2 pasar	5 sekolah, 2 gedung, 2 pasar	5 sekolah, 2 gedung, 2 pasar	5 sekolah, 2 gedung, 2 pasar	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebencanaan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	BPBD, Dinas Sosial
7.		Jumlah Pengaduan Melalui Nomor Tunggal Panggilan Darurat	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tingkat penanganan kejadian bencana	Pengembangan NTPD (Nomor Tunggal Panggilan Darurat)	Integrasi Call Center ke dalam NTPD Kota Bogor	-	1	-	-	-	Mengembangkan sistem pelaporan kedaruratan yang efisien, efektif dan responsif	Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	Diskominfo

## DIMENSI : SMART ENVIRONMENT

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
1.	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara Dan Air Sungai	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran indeks kualitas udara</li> <li>Pengukuran indeks kualitas air</li> </ul>	Pengujian dan Analisa Kualitas Udara Ambient  Pengujian dan Analisa Kualitas Air Sungai	Terhitungnya Indeks kualitas udara ambient sesuai dengan target dalam RPJMD  Terhitungnya Indeks kualitas air sesuai dengan target dalam	Mencapai target IKU sebesar 79 dengan pengujian pasif di 4 titik	Mencapai target IKU sebesar 79.5 dengan pengujian pasif di 4 titik	Mencapai target IKU sebesar 80 dengan pengadaan alat EQM di 1 titik	Mencapai target IKU sebesar 80.5 dengan pengadaan alat EQM di 1 titik	Mencapai target IKU sebesar 81 dengan pengadaan alat EQM di 2 titik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan lingkungannya</li> <li>Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan</li> </ul>	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
						RPJMD	dengan pengujian pasive sampler di 4 titik	n pengujian passive sampler di 4 titik	n pengujian passive sampler di 4 titik	n pengujian passive sampler di 4 titik	n pengujian passive sampler di 4 titik			
2.		Cakupan Kawasan Lindung	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas kawasan perlindungan, pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati (lokasi)	Perlindungan dan Konservasi SDA	Perlindungan terhadap 7 Kawasan	7	7	7	7	7	Mengamankan kawasan lindung yang telah ditetapkan	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan
3.	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Berbasis Masyarakat	Volume Sampah Terangkut Ke TPA	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume Sampah Terangkut (persen)	Pengangkutan sampah Sosialisasi program 3 R dan pelayanan sampah	Diangkutnya sampah dan Meningkatnya layanan persampahan	71,37	72,37	73,37	74,37	75,37	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R</li> <li>✓ Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R</li> <li>✓ Mendorong koordinasi lintas sektor terutama</li> </ul>	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
												perindustrian dan perdagangan ✓ Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan		
4.			Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	Persentase volume sampah yang diolah di TPA (%)		Pengelolaan 3,5 persen sampah TPA	3,8	4,1	4,4	4,7	3,5			
5.		Persentase Reduksi Sampah Rumah Tangga	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)</li> <li>Jumlah Bank Sampah (lokasi)</li> </ul>	Pembangunan dan peningkatan kapasitas TPS 3R  Optimalisasi teknologi pengelolaan sampah	Terbangunnya dan meningkatnya kapasitas layanan 3R  Terkelolanya sampah di sumber	16	17	18	19	20	Mendorong masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi melalui pendekatan circular economy	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
6.		Persentase Layanan Air Limbah Bagi	Peningkatan kualitas pelayanan air	• Penataan dan pengembangan IPAL komunal	• Penataan dan pengembangan	Jumlah IPAL Komunal	25 IPAL komu	5 IPAL komu	5 IPAL komu	5 IPAL komun	5 IPAL komun	Meningkatkan cakupan layanan air limbah bagi	Perumahan Rakyat dan Kawasan	Dinas Perumkim



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		Masyarakat Yang Tidak Memiliki Saluran Air Limbah	limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Jumlah jenis sarana dan tehnik pelayanan air limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sambungan rumah yang dilayani oleh sistim pengolahan air limbah</li> <li>Peningkatan Jumlah jenis sarana dan tehnik pelayanan air limbah</li> </ul>	Jumlah sambungan rumah sebanyak 1100 dari (SR) 258.109 KK 0,43% masyarakat terlayani oleh IPAL Komunal	nal	nal	nal	al	al	masyarakat melalui pembangunan IPAL komunal dan tingkat penyerapan layanan dalam lingkup layanan IPAL komunal	Permukiman	
7.	Terciptanya Tata Kelola Energi Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Penggunaan BBG	Peningkatan konversi BBM ke BBG pada kendaraan operasional pemerintah	Jumlah kendaraan milik pemerintah yang menggunakan BBG	Pilot Project Konversi BBM ke BBG bagi Kendaraan Operasional Pemda	34 Kendaraan Operasional	-	8	8	9	9	Meningkatkan penggunaan BBG tidak terbatas hanya pada angkutan umum perkotaan	Lingkungan hidup	Semua OPD
8.		Terbangunnya Pembangkit Listrik Bertenaga	Pengembangan teknologi pengolahan energi	Persentase pengadaan teknologi PLTS	Pembuatan Feasibility Study dan Amdal PLTS	1 Dokumen FS dan 1 Dokumen	-	-	1 Dokumen FS	-	-	Mengupayakan percepatan kerjasama pembangunan PLTS	Perencanaan	Bappeda, DLHK

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	OUTPUT	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					STRATEGI	BIDANG URUSAN	PD
							2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
		Sampah	terbarukan dan berkelanjutan			Amdal			dan 1 Dokumen Amdal					
9.		Persentase Penggunaan Tenaga Surya Pada Utilitas Publik	Pengembangan teknologi pengolahan energi terbarukan dan berkelanjutan	Persentase penggunaan panel surya pada penerangan jalan umum	Pilot Project Pengadaan PJU Cerdas	100 PJU cerdas	-	-	50	50	-	Meningkatkan penggunaan tenaga surya pada sarana umum	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumkim

MASTERPLAN SMART CITY DAERAH

*smart city*

**KOTA BOGOR**

**MANAJEMEN INOVASI SMART CITY**

NAMA_INOVASI	NILAI	TGL
INTELEGENT TRANSPORT SYSTEM	22.5	05-09-2017
Pemasangan Escape di Perdestrian	97	28-08-2017
E-Tiket BTS Transpakuan	83	28-08-2017
Market Place Sampah	37.5	28-08-2017
SILAK		2017-08-18
Digital signature SMART (Tanda tangan digital)	13.5	28-08-2017
BOGOR CITY e-Tourism	13.5	28-08-2017
SIPERI ( Sistem pengendalian Rekomendasi izin	13.5	28-08-2017
Simpus	13.5	28-08-2017
SITANDUK (Sistem informasi data administrasi kependudukan)	13.5	28-08-2017
SIML	83	28-08-2017
Semi real time big data	13.5	28-08-2017
SISPEK (Sistem pelayanan kelurahan)	83	28-08-2017
Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang (SIP3R)	81	28-08-2017
PATEN	85	08-09-2017
LaMPiD	28.5	08-09-2017
PR2	0	13-09-2017
SIMPENAN (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi)	24.75	13-09-2017
Sistem Informasi Pajak Daerah Online	45	13-09-2017
Portal Satu Data	80	18-09-2017
SIMBADA	78	24-09-2017
SIMDA	78	24-09-2017
SEMAT (Sensor Macet)	1.5	02-11-2017
Asuh Pendidikan	1.5	02-11-2017
E-Infrastructure	1.5	02-11-2017
Regular Desludging (Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal)	3.75	02-11-2017
Pencari kerja onllen kota bogor	5.25	02-11-2017
SIRKAS (Sistem informasi rencana anggaran kegiatan sekolah)	5.25	02-11-2017
Sllak	3.75	02-11-2017
Pemanfaatan Dana CSR bagi Angkot Wisata Kota Bogor	3.75	02-11-2017
e-SIR Bogor Sehat	35.25	02-11-2017
Lavitrap	5.25	02-11-2017

Page number: 1/1 Nov 03, 2017 at 01:15 PM

**MANAJEMEN INOVASI SMART CITY**

NAMA_INOVASI	KEMITRAAN	POTENSI
INTELEGENT TRANSPORT SYSTEM	Pihak Ketiga oleh PT.BONET UTAMA	Membuka port-port aplikasi tranparan system (ITS Port) Agar ITS dapat dia lebih jauh (misal SMS Server,Display VMS dijalan,GPS dan e-traffic kios un masyarakat pada beberapa fasilitas publik.) 2. Dishub dan kepolisian dapa memanfaatkan integrasi CCTV dan ATCS-ITS untuk crime detection System pendidikan pelanggaran dengan mengguanakan sistem SCATS (Sydney C Adaptive Traffic System)
Pemasangan Escape di Perdestrian	Kolasi Pejalan Kaki Bogor, Penyandang Disabilitas dan Komunikasi Persepeda sebagai Mitra Pengguna,pemberi masukan/ide ( tambah-kurang)	Pemasangan Escape diseluruh Pedestrian wilayah Kota Bogor
E-Tiket BTS Transpakuan	Bank Jawa Barat (BJB), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri sebagai mitra pengisian deposit/saldo/top up.	pengembangan diseluruh Shelter BTS Transpakuan wilayah Kota Bogor
Market Place Sampah	Dinas Kebersihan sebagai pengelola proses didukung pengelola teknologi ecommerce	Dikelola secara profesional sehingga dapat menampung transaksi sampah wilayah kota/kabupaten di Jawa Barat hingga Nasional
SILAK		Akan dikembangkan untuk laporan realisasi yangdibutuhkan Aldabang
Digital signature SMART (Tanda tangan digital)	kekominfo, penyedia sertifiakt digital	
BOGOR CITY e-Toorism	CSR ITB	
SIPERI ( Sistem pengendalian Rekomendasi izin	sekolah	sinkron dengan data dapodik (data pokok pendidikan ) (kemdikbud)
Simpus	Simpus bermitra dengan bpjs	
SITANDUK (Sistem informasi data administrasi kependudukan)	pihak-pihak yang berhubungan dengan data kependudukan	Penambahan,aplikasi lain untuk memperkaya data layanan dan dapat dim internal maupun external. dan pemanfaatan

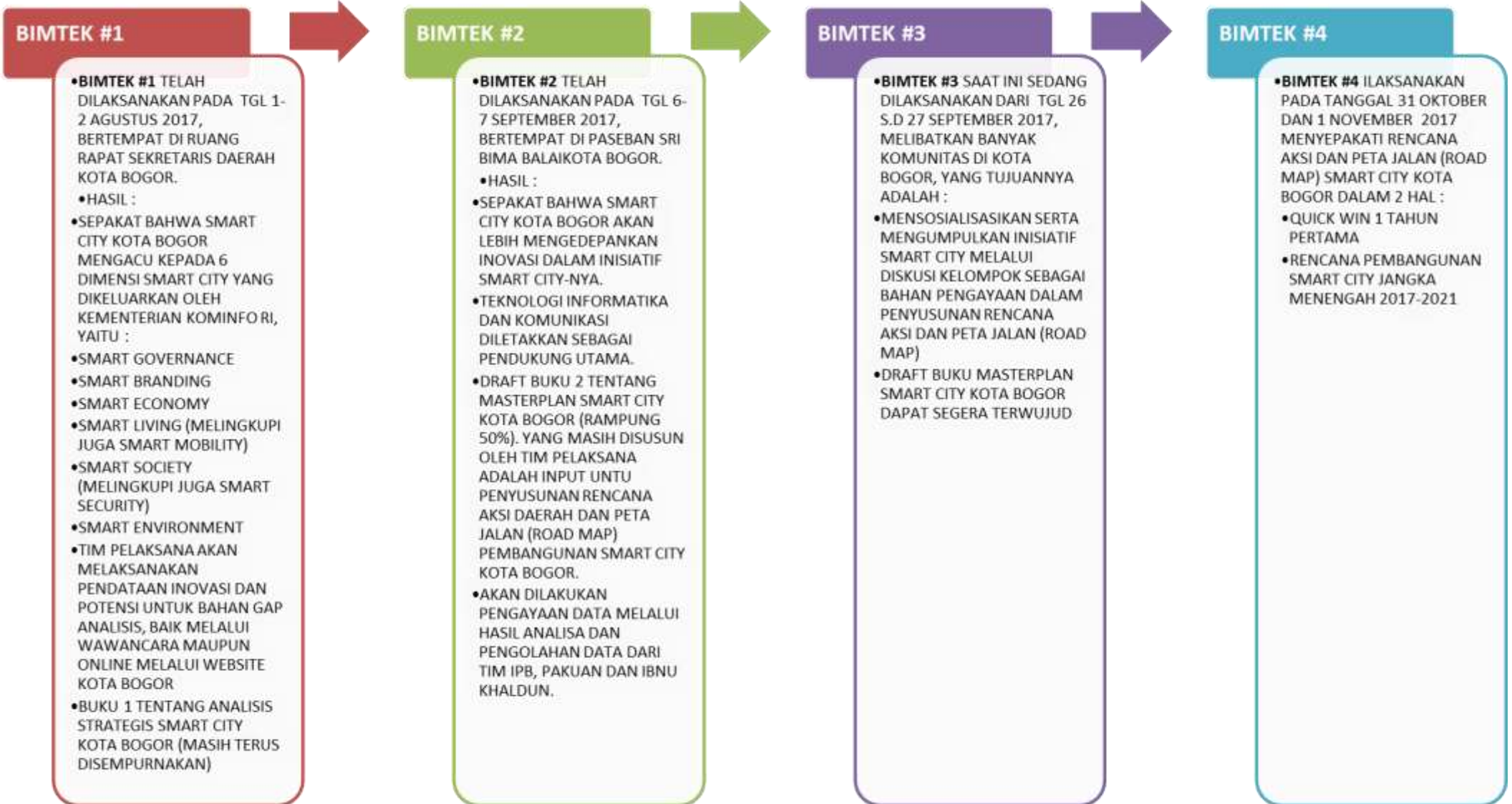
NAMA_INOVASI	KEMITRAAN	POTENSI
		biometrik penduduk
SIML	OXALIS	pengembangan aplikasi dikembangkan secara bertahap perbidang
Semi real time big data	kelurahan ,kecamatan,bagian pemerintahan,bappeda,BPS,Masyarakat(RT,RW)	pengembangan fungsi dan analisis dan pengolahan data,pengembangan k kemampuan menyusun model melalui model ekonometrik atau pemodelan lainnya,terintegrasi dengan sistem informasi lainnya yang berkaitan dengan
SISPEK (Sistem pelayanan kelurahan)	Diskominfostandi	Memaksimalkan lembaga pendidikan/kurus IT untuk memberikan pelatihan pegawai kecamatan kelurahan
Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang (SIP3R)		Kesiapan sumberdaya manusia yang memadai, koordinasi antar perangkat sudah berjalan dengan baik
PATEN	Pemerintah dan Organisasi	Penambahan Pelayanan Non Perizinan Lainnya
LaMPiD	Kelurahan dan Disdukcapil	Terintegrasi dan Sinergi
PR2	Pemerintahan dan Organisasi	Terintegrasi dan Sinergi
SIMPENAN (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi)	Diskominfostandi	Penambahan fitur notifikasi
Sistem Informasi Pajak Daerah Online	Bank BJB sebagai bank kas daerah yang menerima pembayaran pajak, Bank BTN sebagai tempat pembayaran, PT. POS sebagai tempat pembayaran, PT. Telkom sebagai penyedia layanan internet, Kejaksaan Negeri Bogor sebagai mitra penegak hukum	Potensi pengembangan maupun replikasi sangat mungkin dilakukan oleh p daerah se-Indonesia dikarenakan dasar pengembangan ini merupakan pen yang diamanatkan dari undang-undang
Portal Satu Data	Pihak Ke 3	rencana pengembangan portal satu data untuk memaksimalkan data
SIMBADA		
SIMDA	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	

NAMA_INOVASI	KEMITRAAN	POTENSI
SEMAT (Sensor Macet)		
Asuh Pendidikan	Dinas pendidikan, pengusaha, relawan, orang yang dermawan dan sekolah	Dapat diaplikasikan untuk seluruh Indonesia
E-Infrastructure	Pemkot	Menambahkan fitur Video untuk memperjelas infrastruktur yang akan di analisis perkembangan Infra kota
Regular Desludging (Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal)	Sebagai kewenangan sebagai operator akan dialihkan ke PDAM terutama dalam aspek database pelanggan dan sistem billing	Potensi perluasan dan replikasi diperkirakan cukup besar dengan prasyarat yang kontinu dan keterlibatan para pihak secara konsisten.
Pencari kerja online kota Bogor	Dikerjakan oleh pihak ke 3	Ada
SIRKAS (Sistem informasi rencana anggaran kegiatan sekolah)		Kearifan aset sekolah
Silak	tidak ada	laporan terintegrasi dengan aset
Pemanfaatan Dana CSR bagi Angkot Wisata Kota Bogor	Pemerintah Daerah, Koperasi Angkot; Perusahaan Swasta	Pemerintah Daerah; Koperasi Angkot; Perusahaan Swasta
e-SIR Bogor Sehat	e-SIR Bogor Sehat bermitra dengan BPJS Kesehatan (Aplicare) Untuk ketersediaan temoat tdr, bermitrasi organisasi profesi kesehatan	e-SIR Bogor Sehat dan Simpus bisa menjadi satu link (Berintegrasi), Sebagai kesehatan primer dan lanjutan dimana harapan kedepan bisa link dengan Walikota (untuk konten tertentu sesuai yang dibutuhkan)
Lavitrapp		

## TIME LINE KRONOLOGIS SMART CITY KOTA BOGOR DALAM GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY INDONESIA







## ALUR PEMBANGUNAN INISIATIF, AGREGASI INOVASI, PERENCANAAN, DAN PELAKSANAAN SMART CITY



MASTERPLAN SMART CITY DAERAH

*smart city*

**KOTA BOGOR**

## LAMPIRAN 1

### WAWANCARA WALIKOTA BOGOR DENGAN GRUP KOMPAS GRAMEDIA DALAM PENYUSUNAN BUKU GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY INDONESIA

Bertempat di Pendopo 6 Vila Baranangsiang Indah, Minggu, 10 September 2017

#### BAGAIMANA VISI DAN MISI KOTA BOGOR MENGENAI SMART CITY ?

##### Point Pertama :

Harapan dari warga semakin meningkat sementara di sisi lain pemerintah kota punya banyak keterbatasan dalam hal personil, anggaran, dan kami merasa bahwa teknologi adalah jawabannya. Karena pada saat kita menghadapi keterbatasan, teknologi menemukan tempatnya.

##### Point Kedua :

Kami meyakini bahwa dimana warga memiliki harapan (untuk) dilayani lebih baik, ini saatnya bagi kami untuk melayani warga dengan menggunakan perangkat teknologi. Kami percaya bahwa layanan publik bisa menjadi lebih efektif, lebih efisien dan lebih mudah ketika kita mengedepankan teknologi.

##### Point Ketiga :

Bagi kami teknologi bukan hanya sekedar efisiensi, tapi ada dua point lagi selain efisiensi, yaitu teknologi untuk partisipasi dan teknologi untuk transparansi. Untuk yang kita kedepankan, teknologi, mencoba untuk mengimplementasikan smart city. Tiga hal yang menjadi target kami, pemerintah menjadi lebih efisien, yang kedua pemerintahan lebih transparan karena publik akan relatif lebih mudah mengakses berbagai macam informasi. Dan yang ketiga, partisipasi publik juga bisa didorong lebih baik lagi. Teknologi untuk efisiensi, teknologi untuk transparansi, dan teknologi untuk partisipasi. Itulah Visi kami ke depan untuk Smart City.

Ada 3 (tiga) tonggak bagi kita menetapkan visi kita ke depan : Bogor yang Beriman, Nyaman dan Transparan.

Beriman itu konteksnya vertikal, kehidupan religius transendental. Tapi ketika berbicara nyaman dan transparan, disinilah peran smart city. Kota ini akan lebih

nyaman kalau kita kedepankan teknologi. Kota ini juga akan lebih transparan jika kita terapkan teknologi. Lebih mengait betul dengan visi kita yang nyaman, beriman dan transparan. Terutama yang nyaman dan transparan.

### **APA SAJA PRINSIP-PRINSIP SMART CITY DI KOTA BOGOR ?**

Sebetulnya prinsip-prinsipnya sudah mulai sejak era e-governance. Prinsip-prinsip mengurangi paper works (kertas), prinsip untuk mencoba mengintegrasikan semua aplikasi, prinsip untuk memudahkan warga menyampaikan aspirasi juga sudah ada. Terkait prinsip terakhir (aspirasi warga) tonggakinya ketika kami mendapatkan award kedua dari IDSA tahun 2014. Saat itu kami diundang sebagai finalis. Setelah dipelajari, hal tersebut bisa mejadi guideline bagi kami untuk membangun smart city. Karena IDSA (Indonesian Digital Society Award) melihat dari kesiapan infrastruktur, dan kesiapan dari warga. IDSA lebih kepada penilaian terhadap gagasan kota bogor, bukan penilaian tentang smart city. Itulah tonggak yang mendorong kami untuk konsisten walaupun pada kenyataannya konsisten dan fokus adalah hal yang tidak mudah. Karena, smart city itu ibarat rimba belantara.

Jadi, kalau kita tidak punya pegangan, tidak punya TOR (Term of reference), kita bisa tersesat. Yang pertama adalah mana/apa dulu, yang kedua memakai apa, sementara banyak pihak yang menawarkan, dan yang ketiga terkait dengan alokasi anggaran, karena semua hal tersebut memerlukan anggaran, sementara kondisi APBD kota bogor belum bisa untuk mengkondisikan (smart city) secara maksimal. Jadi, kami banyak dibantu oleh program-program kementerian, CSR (Corporate Sosial Responsibility), karena alokasi dana APBD sendiri tidak signifikan.

### **UNTUK MENGUPAS PRIORITASNYA BAGAIMANA ?**

#### **Satu.**

Melalui brainstorming dengan banyak pihak, seperti ITB, Telkom dan kementerian, juga diskusi yang banyak dilakukan oleh Diskominfo, didapat :  
Point pertama adalah bahwa Smart City is not just cctv, karena banyak yang menafsirkan seperti itu.

Point kedua, smart city harus sesuai dengan kebutuhan kota bogor yang ingin dikedepankan dengan baik dikaitkan dengan karakteristik masing-masing daerah, dikaitkan juga dengan program prioritas kota bogor.

Jadi, kami sedang berusaha untuk menyederhanakan itu membuat lebih fokus melalui upaya penyusunan master plan smart city, pembentukan dewan smart city dan tim pelaksana smart city. Smart city membutuhkan jenderal dan TOR agar tidak terombang-ambing. Datang ke forum ini jualan itu, datang ke forum itu

jualan ini. Oleh karena itu kita membutuhkan TOR, apa yang diperlukan kota bogor, disesuaikan dengan skala prioritas kota bogor, transportasi, penataan PKL, sampah/kebersihan, dan reformasi birokrasi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, mengait ke hal2 itu.

#### **Dua.**

Kota bogor fokus kepada satu aspek, yang menjadi PRIME MOVER atau pioneer yang mendorong sektor-sektor lain untuk bisa bergerak. Terutama Perijinan dalam bidang reformasi birokrasi, relatif kencang jalannya seperti perijinan online. Hal hal yang diimplementasikan untuk 3 hal tersebut, terutama transparansi dan efisiensi.

Saat ini Perijinan kota bogor menjadi benchmarking dari banyak daerah di indonesia, diberikan apresiasi KPK, karena sekarang segala sesuatu menjadi lebih terukur, dan layanan menjadi sedemikian baik sehingga warga bisa tahu berapa lama, berapa biaya pengurusan dan sebagainya. Hal-hal tersebut kemudian memberikan inspirasi bagi dinas-dinas lain untuk mengejar prestasi perijinan. Dispenda (Badan Pendapatan Daerah) pun seperti itu, jadi saya minta kepada semuanya untuk berkreasi inovasi-inovasi yang memudahkan, seperti PBB online yang bisa di update warga, bahkan dikompetisikan. Transparansi itu digunakan untuk mendongkrak pendapatan PBB dan kelurahan yang paling tinggi diberikan apresiasi. Juga terdapat tapping box yang dipasang di Wajib Pajak, di restoran dan hotel, sehingga bisa memonitor jumlah penerimaan pajaknya untuk PAD.

#### **HAMBATAN APA YANG MUNCUL DALAM PENERAPAN SMART CITY (TAPPING BOX) KEPADA INVESTOR ?**

Hambatan pertama adalah faktor manusia, hambatan kedua adalah faktor teknis. Saat kota bogor mengadakan penerapan trial and error (uji coba), ada gangguan berupa tangan2 jahil. Sedangkan masalah teknis muncul dalam hal persoalan signal, frekuensi dan alat-alat. Walau demikian ada dampak positif terhadap PAD. Di awal dipasang sebanyak 200 tapping box, lalu kemudian alat2 itu diputar ketempat lain yang menimbulkan dampak psikologis bagi mereka yang mau melakukan (misalnya) manipulasi. Itulah maksud dari semua ini, yaitu harus berdampak bagi layanan publik terutama untuk transparansi.

#### **APA SAJA PENCAPAIAN YANG DIDAPAT DI JANGKA PENDEK ?**

Ukuran mengacu pada Indeks Kepuasan Masyarakat (publik/warga) seperti survey yang dilakukan oleh BAPPEDA ataupun survey pihak ketiga, dimana terdapat angka-angka yang cukup signifikan terkait dengan pelayanan publik. Dimana

reformasi birokrasi pelayanan publik naik. Memang belum data langsung bagi kami yang menyatakan keterkaitannya, namun saya percaya bahwa hal itu ada keterkaitan. Karena saat ini, terutama warga sangat dimudahkan untuk mendapatkan/mengakses informasi, pengurusan dalam hal perijinan, dan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, bisa saja award itu menjadi ukuran, walaupun secara pribadi selaku walikota kurang suka untuk menyampaikan bahwa kita mendapat penghargaan karena penghargaan itu sejatinya dari warga, bukan dari pemerintah ataupun lembaga swasta. Bagi kota bogor, ukurannya adalah rakyat, warga puas atau tidak, dan bagaimana mengukur kepuasannya tentu melalui survey indeks kepuasan masyarakat itu.

### **APA SAJA TANTANGAN UNTUK KOTA BOGOR MENJADI KOTA CERDAS ?**

Tantangan yang utama adalah dalam menyusun suatu sistem (sumber daya manusia) yang kompatibel yang bisa menyesuaikan. Misalkan jika Kepala Diskominfostandi Kota Bogor pindah, sudah ada sistemnya dan kadernya, atau bagaimana kita memposisikan diri dalam hubungan dengan pihak ketiga, dengan konsultan, komunitas dan kampus yang terus menyambung (terhubung). Jika tidak, dikhawatirkan akan ada kemunduran. Jadi tantangan utama adalah di bidang SDM (sumber daya manusia), tentang bagaimana kita dengan kondisi seperti ini (keterbatasan) tetap bisa konsisten berjalan (membangun smart city).

Tantangan kedua adalah anggaran. Dari sisi pemerintah, dukungan legislatif itu penting. Dari sisi warga pun sama, smart city need smart people (kota cerdas membutuhkan warga yang cerdas) yaitu orang-orang yang bisa menggunakan layanan ini dengan baik, kurang lebih begitu. Tingkat melek teknologi warga kota bogor sudah sangat baik, literasi internet pun sudah sangat baik. Tetapi, kebiasaan mereka untuk menggunakan teknologi untuk layanan publik masih harus terus dilakukan proses edukasi. Terkadang, banyak informasi terkini (hal-hal yang dimiliki pemerintah) sangat sulit untuk sampai kepada mereka, banyak yang belum warga ketahui, yang baru mereka ketahui belakangan.

Seperti contohnya layanan yang seharusnya populer, yaitu 112, kesiapan society-nya (proses edukasi). Tapi kami menyadari bahwa kultur harus dibangun dengan infrastruktur. Artinya, seharusnya ada teknologi untuk menangkal gangguan-gangguan (hoax dan oknum nakal kepada NTPD 112). Ini tantangan bagi kota bogor untuk terus berinovasi. Bagaimana upaya untuk melawan hoax, apakah teregister, apakah ada filter, jadi kota bogor akan menuju ke arah sana nantinya.

## **PENCAPAIAN APA SAJA YANG DIBANGGAKAN ?**

Perijinan, dikarenakan ada data-data konkretnya. Juga layanan lelang barang dan jasa secara elektronik, dimana kota bogor adalah termasuk yang terbaik di Jawa Barat. Perijinan diapresiasi oleh KPK, LPSE juga, Bapenda juga memperoleh nilai IKM sebesar 93% dari 3 lembaga penilai independen, dan semuanya mengacu kepada data yang konkret.

## **SUMBER UTAMA DALAM PENDAPATAN APA SAJA ?**

PAD kota bogor sebagian besar dari perdagangan dan jasa. Dari sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) restoran, hotel, dan pajak , dari PAD sebesar 800 milyar lebih, sekitar 80% sebagian besar diperoleh dari sektor itu.

## **ADAKAH POTENSI-POTENSI YANG BARU UNTUK MENARIK INVESTOR**

Saat ini kota bogor sedang mencoba mengembangkan sport tourism. Menjadikan kota bogor sebagai kota olahraga yang juga diminati oleh wisatawan. Kota bogor mendeklarasikan diri sebagai city of runners (kota pelari). Kami membangun fasilitas publik untuk berlari, kami juga membina komunitas-komunitas dan bahkan saat ini kota bogor sedang proses pembuatan MOU dengan indosat untuk kerjasama smart city yang diturunkan kepada aspek city of runners. Kami mendesain fasilitas dan aplikasi yang memudahkan pelari untuk kemudian berlari di kota bogor dimana saat berlari bisa mengakses secara otomatis dan tau semua hal tentang detak jantung, lokasi dimana mereka berada, sudah berapa jauh berlari, berapa jauh pelari terdekat ada dimana, terkoneksi dengan layanan kesehatan. Karena sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang dapat diperoleh secara free (gratis/bebas), tentunya harus berbeda, ketika mereka datang dapat langsung terkoneksi.

## **ADAKAH STRATEGI KHUS UNTUK KEDEPANNYA ?**

YA, TENTUNYA ADA.

**Kesatu**, gagasan, konsep atau ide. Itulah relevansi dari master plan. Driven by idea (diarahkan oleh ide-ide) yang jelas.

**Kedua**, payung hukum. Contohnya untuk jaringan infrastruktur, kita membutuhkan perda atau perwali yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan transportasi jaringan. Contohnya microcell.

**Ketiga**, sumber daya manusia (SDM). SDM yang terus ditingkatkan pemahaman teknisnya. Walikota selalu mendorong untuk berlatih, membuka wawasan.



Smart city pada dasarnya meminimalkan intervensi manusia, mengedepankan peran teknologi. Dengan asumsi intervensi manusia itu tidak bisa membebaskan faktor-faktor kepentingan. Ketika semua dikembalikan ke teknologi, jadi lebih transparan.

Contohnya, kesatu, dahulu jika ingin memantau kondisi lalin cukup merepotkan, sekarang lewat gadget (gawai) sudah bisa cek, itu adalah hal yang paling sederhana dan cepat. Kedua, dahulu agak sulit membaca keinginan warga, sekarang ada aspirasi online. Dahulu satu hari bisa masuk ratusan sms ke nomor sms hotline walikota, sekarang, ada saluran khusus yang langsung bisa merekap dan disajikan oleh diskominfo dalam bentuk chart tentang seberapa banyak yang sudah selesai. Bagi yang belum selesai (ditindaklanjuti) akan ditegur (kepala perangkat daerahnya), juga bisa menggambarkan isu apa yang paling dominan dan tidak. Hal itu sangat memudahkan untuk membaca trend warga.

Saat ini ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk memonitor layanan kesehatan, data pasien dan obat-obatan di puskesmas (contohnya puskesmas bogor timur) bisa diakses oleh walikota. Untuk RSUD, juga bisa diketahui oleh walikota tingkat layanan dan jumlah kamar yang tersedia.

## LAMPIRAN 2

Strategi pembangunan smart city

Quick win dan rencana tahunan : program dan inisiaif

Dukungan yang diperlukan : kebijakan, kelembagaan, kemitraan, infrastruktur dasar

Smart city Bimtek 3: Walikota menginginkan masterplan smart city kota bogor.

Visi misi kota bogor:

1. Memilih branding berdasarkan kenyataan
  - a. Daya dukung saat ini berdasarkan potensi bogor
  - b. Daya dukung kepada komunitas untuk membangun ekonomi kreatif (hasil karya kreatifitas komunitas) membuat satu gedung masalahnya

Harapan	Kenyataan
Bogor kota yang lancar, fasilitas parkir yang memadai	Kemacetan, fasilitas parkir yang belum tertata, sarana pendukung yang belum memadai
Budaya: Bogor kota terpeliharanya situs / heritage di kota bgor Pariwisata: Wisata bias berkembang dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ekonomi kreatif: tersedia nya sarana prasana dan penunjang lainnya untuk mengakomodir kreatifitas masyarakat.	Budaya : banyak peninggalan yang terbangkalai yg belum di jaga masyarakat dan pemerintah dan belum ada pengembangannya. Pariwisata: masih lemah belum ada inovasi salah satunya konsep management pemasaran belum dan antusias masyarakat masih kurang berdampak pada masyarakat kota bogor. Ekonomi kreatif: inovasi dan kreatifitas masyarakat masih belum berubah masih lemah, salah satunya adalah mengembangkan kreatifitas bahan baku yang ada di kota bogor. Peran serta pemerintah merubah mainset pemerintah bimbingan atau pelatihan belum optimal. Sarana prasana gedung kreatifitasnya belum ada. Faktor modal biaya.
Untuk memberikan citra bogor yang lebih rapi bersih dan tertata dengan menata PKL lebih baik.	Banyak PKL yang berserakan, mengganggu trotoar membuat kumuh. Adminstrasi: belum terintegrasi dengan

	<p>pelayanan public lainnya (bank, dll) masih sulitnya masyarakat pelayanan kepuasaan yang prima (umk umr)</p>
<p>Map tourism, penyediaan jasa wisata, pemberdayaan masyarakat di sekitar heritage, kegiatan</p>	<p>Potensi banyak namun belum banyak dikenalkan kepada khalayak luas. Akses destinasi wisata belum tau bagi masyarakat. Plang belum jelas. Bogor dikenal kota wisata, wisatwan meningkat namun belum ada membantu masyarakat wisata. Belum ada smart maps di beberapa lokasi transportasi. Kenyataannya banyak situs peninggalan yang diubah menjadi berubah fungsi. Kota bogor belum berani membeli bangunan tua untuk dikelola pemerintah kota sehingga potensi Kehilangan kultur budaya dan sejarah. Branding kota masih jauh atau belum ramah anak. Pengawasan pada anak belum baik.</p>
<p>Otomatisasi pelayanan</p>	<p>Kesenjangan sosial masih tinggi gap tingkat sosial masih tinggi, transparansi kinerja pemerintah pada public masih kurang, pelayanan panjang dan lama masih kurang efektif,.</p>
<p>Masih masing wilayah punya icon sendiri, PKL yang difasilitasi pemerintah, kajian partisipasi masyarakat tentang warisan sejarah lebih ditingkatkan, daya dukung masyarakat agar bisa menjaga situs sejarah, konsep ppp yang perlu diterapkan</p>	<p>Bogor itu apa branding nya masih belum mengarah ke positif, perilaku masyarkat terhadap lingkungan belum sadar, penataan belum terintegrasi, kota bogor menjadi hedonism masalah urban development, fungsi satpol pp belum baik, teknolgi pendukung di pemerintahan kurang di sector kelurahan, kurangnya sosialisasi warisan sejarah yang kental sekali di bogor kajian partisipasi kurang, kesinambungan branding, perlu kerjasama dinas pariwisata dengan komunitas, lemahnya kordinasi dan regulasi antar institusi,</p>

	saling berbenturan institusi atau stakeholder.
Komunitas situs sejarah,	Harus memiliki satu pesan penting branding di kota bogor, ada kaitannya ekonomi kreatif, apa branding bgor yang sekarang dengan ide yang bagus. Kemudahan akses pemerintah. Pemanfaatan digital science. Publikasi penting. Konsentrasi peran penting pada beda lembaga.
Ada pusat parkir	Sektor terbesar di pariwisata, masalah infrastruktur lalu lintas, tidak punya parkir terpusat, regulasi belum ada pemerataan, rencana tata ruang pembangunan harus tepat belum merata, belum jadi fasilitator masyarakat atau pelaku pariwisata,
	Living lab, informasi, akses

**Kesimpulan:**

1. Wisata, Budaya, Ekonomi Kreatif, dan Akses yang belum dikelola secara maksimal.
2. Harapannya: kota bogor yang berbudaya, wisata, kreatif, dan mudah di akses.

**Inovasi:**

“ Bogor kota

1. Wisata tematik, bogor art (bogor kota seni), Smart pariwisata transportasi dan hotel atau penginapan, bogor kota event, city of science, bogor kota inovasi inspirasi,

**Inovasi** : digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi smart tourism di kota bogor.

1. Smart Guide : Anjungan informasi di titik lokasi strategis untuk wisatawan datang berkunjung
2. Smart Event: informasi terintegrasi akses event kota bogor di seluruh instansi.
3. Smart Maps: informasi maps bagi wisatawan menuju destinasi wisata.
4. Marketplace Ekonomi Kreatif

### Faktor sukses

1. Daya Dukung: Baik karena sangat potensial dengan komunitas yang sangat mendukung perubahan baik dari SDM maupun SDA.
2. Daya Tarik: Baik karena banyaknya peninggalan situs-situs wisata yang bisa menjadi citra kota bogor.
3. Data Cipta: Baik karena banyaknya masyarakat kreatif dalam wadah komunitas.
4. Daya Ubah: Sedang karena
5. Daya tahan: Sedang mengingat banyaknya kepentingan dalam pengelolaan kegiatan

### Hasil Diskusi Kelompok Smart e-Governance

Tabel 11. Tabel Hasil Diskusi Kelompok Smart e-Government

No	Permasalahan	Kondisi	Solusi
1	<p>a. Kebijakan Pemerintah</p> <p>b. Adanya informasi pembangunan infrastruktur.</p> <p>c. Akses pengesahan dokumen</p> <p>d. Pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan.</p> <p>e. Adanya aplikasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan yang dapat di akses langsung masyarakat.</p> <p>f. Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD</p> <p>g. Koneksi jaringan internet yang cepat dan baik.</p> <p>h. Komunikasi antara kecamatan, kelurahan dan disdukcapil mudah.</p> <p>i. Otentikasi pelanggaran</p>	<p>a. SIM Pengaduan</p> <p>b. Belum ada</p> <p>c. SIM sudah ada tapi belum optimal</p> <p>d. Aplikasi belum ada</p> <p>e. Sedang dalam proses</p> <p>f. Jaringan sudah ada, perlu penambahan kapasitas dan pemeliharaan</p> <p>g. SIM belum ada</p> <p>h. Fasilitas yang da masih kurang dan belum optimal pemanfaatannya</p>	<p>a. SIM yang terintegrasi semua data</p> <p>b. Dibuat payung hukum untuk pengesahan secara digital.</p> <p>c. Penguatan SDM</p> <p>d. Pembuatan SIM yang terintegrasi</p> <p>e. Percepatan</p> <p>f. Penambahan anggaran</p> <p>g. Membuat SIM</p> <p>h. Penambahan jaringan yang terkoneksi antar instansi</p>

	Hukum (pelanggaran hukum dan kriminal)		
	<b>Publik Servis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan informasi Lowongan Kerja</li> <li>• Akses Pendidikan Menengan dan Tinggi</li> <li>• Perizinan harus sudah ada SOP nya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIM belum terintegrasi</li> <li>• Kewenangan ada di propinsi dan pusat</li> <li>• SIM sudah ada, tapi belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya sistem ticketing Pengaduan</li> <li>• Publikasi informasi beasiswa</li> <li>• Penguatan SDM</li> </ul>

### Hasil Diskusi Smart Branding

Tabel 12. Tabel Hasil Diskusi Smart Branding

Harapan	Kenyataan
Bogor kota yang lancar, fasilitas parkir yang memadai	Kemacetan, fasilitas parkir yang belum tertata, sarana pendukung yang belum memadai
Budaya: Bogor kota terpeliharanya situs / heritage di kota bgor	Budaya : bnyak peninggalan yang terbangkalai yg belum di jaga masyarakat dan pemerintah dan belum ada pengembangannya.
Pariwisata: Wisata bias berkembang dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Pariwisata: masih lemah belum ada inovasi salah satunya konsep management pemasaran belum dan antusias masyarakat masih kurang berdampak pada masyarakat kota bogor.
Ekonomi kreatif: tersedia nya sarana prasana dan penunjang lainnya untuk mengakomodir kreatifitas masyarakat.	Ekonomi kreatif: inovasi dan kreatifitas masyarakat masih belum berubah masih lemah, salah satunya adalah mengembangkan kreatifitas bahan baku yang ada di kota bogor. Peran serta pemerintah merubah mainset pemerintah bimbingan atau pelatihan belum optimal. Sarana prasana gedung kreatifitasnya belum ada. Faktor modal biaya.
Masih masing wilayah punya icon sendiri, PKL yang difasilitasi pemerintah, kajian partisipasi masyarakat tentang warisan sejarah lebih ditingkatkan, daya dukung masyarakat agar bisa menjaga situs sejarah, konsep ppp	Bogor itu apa branding nya masih belum mengarah ke positif, perilaku masyarkat terhadap lingkungan belum sadar, penataan belum terintegrasi, kota bogor menjadi hedonism masalah urban development, fungsi satpol pp belum baik, teknolgi pendukung di pemerintahan kurang di sector kelurahan, kurangnya sosialisasi warisan sejarah yang kental sekali di bogor

yang perlu diterapkan	kajian partisipasi kurang, kesinambungan branding, perlu kerjasama dinas pariwisata dengan komunitas, lemahnya kordinasi dan regulasi antar institusi, saling berbenturan institusi atau stakeholder.
Komunitas situs sejarah,	Harus memiliki satu pesan penting branding di kota bogor, ada kaitannya ekonomi kreatif, apa branding bgor yang sekarang dengan ide yang bagus. Kemudahan akses pemerintah. Pemanfaatan digital science. Publikasi penting. Konsentrasi peran penting pada beda lembaga.
Ada pusat parkir	Sektor terbesar di pariwisata, masalah infrastruktur lalu lintas, tidak punya parkir terpusat, regulasi belum ada pemerataan, rencana tata ruang pembangunan harus tepat belum merata, belum jadi fasilitator masyarakat atau pelaku pariwisata,
Untuk memberikan citra bogor yang lebih rapi bersih dan tertata dengan menata PKL lebih baik.	Banyak PKL yang berserakan, mengganggu trotoar membuat kumuh. Adminstrasi: belum terintegrasi dengan pelayanan public lainnya (bank, dll) masih sulitnya masyarakat pelayanan kepuasan yang prima (umk umr)
Map tourism, penyediaan jasa wisata, pemberdayaan masyarakat di sekitar heritage, kegiatan	Potensi banyak namun belum banyak dikenalkan kepada khalayak luas. Akses destinasi wisata belum tau bagi masyarakat. Plang belum jelas. bOgor dikenal kota wisata, wisatawan meningkat namun belum ada membantu masyarakat wisata. Belum ada smart maps di beberapa lokasi transportasi. Kenyataannya banyak situs peninggalan yang diubah menjadi berubah fungsi. Kota bogor belum berani membeli bangunan tua untuk dikelola pemerintah kota sehingga potensi Kehilangan kultur budaya dan sejarah. Branding kota masih jauh atau belum ramah anak. Pengawasan pada anak belum baik.

### Kesimpulan

Kategori Permasalahan Pokok: Wisata, Budaya, Ekonomi Kreatif, dan Akses yang belum dikelola secara maksimal.

Harapannya: kota bogor yang berbudaya, wisata, kreatif, dan mudah di akses.

## Rekomendasi City Brand

Wisata tematik, bogor art (bogor kota seni), Smart pariwisata transportasi dan hotel atau penginapan, bogor kota event, city of science, bogor kota inovasi inspirasi,

## Inovasi

- Inovasi : digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi smart tourism di kota bogor.
- Smart Guide : Anjungan informasi di titik lokasi strategis untuk wisatawan datang berkunjung
- Smart Event: informasi terintegrasi akses event kota bogor di seluruh instansi.
- Smart Maps: informasi maps bagi wisatawan menuju destinasi wisata.
- Marketplace Ekonomi Kreatif

## Hasil Diskusi Smart Economy

### Pelaku Industri

Tabel 13. Tabel Hasil Diskusi Smart Economy

Permasalahan	Solusi
<ul style="list-style-type: none"><li>• Identifikasi dan Standarisasi Produk</li><li>• Pemasaran produk bogor</li><li>• Wisatawan susah mencari oleh-oleh</li><li>• Keragaman jenis industri banyak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SIM/Database Produk Industri</li><li>• E-Commerce produk bogor</li><li>• One Stop Center penjualan produk bogor</li></ul>

## Hasil Diskusi Smart Environment

### 5 Daya Smart Environment

- Daya dukung : baik, karena memiliki potensi lingkungan yang berkualitas, seperti ada kebun raya bogor, landscape yang indah, namun perlu peningkatan jalan lingkar/alternatif
- Daya Tarik : baik, karena kota bogor menjadi pilihan untuk bermukim dan untuk berwisata
- Daya Cipta : baik, karena kota bogor berupaya meningkatkan luasan taman-taman kota, pedestrian, konversi bbm ke gas, mengembangkan angkutan umum massal, meningkatkan kualitas air baku, meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengelolaan PJU yang hemat energi



- Data Ubah : kurang, rendah kemampuan anggaran, keterbatasan SDM untuk mengimplementasikan inovasi, regulasi yang kurang,
- Daya Tahan : kurang, tingginya investasi hunian dan sector jasa, kendaraan pribadi semakin meningkat, jumlah angkutan kota banyak, law inforcement rendah, masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan, rendahnya koordinasi dengan wilayah Kabupaten Bogor

Tabel 14. Tabel Hasil Diskusi Smart Environment

Harapan	Kenyataan	Kendala
<b>Transportasi :</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportasi yang ramah lingkungan : konversi bahan bakar dari BBM ke Gas, yang berdampak secara ekonomi terjadi penurunan Biaya Operasional, penurunan emisi gas buang</li> <li>• Efisiensi penggunaan ruang jalan : Penerapan Sistem angkutan massal (konversi angkutan kota ke angkutan massal, BRT, LRT), untuk peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum dan mengurangi kemacetan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baru 250 angkot yang ber BBG dari 3400 angkot, belum bisa ditingkatkan</li> <li>• Sudah ada 16 badan hukum layanan angkutan umum (d/h perseorangan) dan siap untuk mendukung konversi tersebut</li> <li>• Awal tahun 2018 konversi angkot direncanakan sudah dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan SPBG terbatas (baru 1 unit di Jl. Merdeka), menyebabkan kendala dalam pasokan gas</li> <li>• Rendahnya akses pengusaha terhadap penyedia dana (bank/leasing) yang mau membiayai konversi ini.</li> <li>• Belum kepastian subsidi angkutan massal dari pemerintah kota (masih proses), karena transportasi bukan hanya bisnis transportasi tetapi merupakan pelayanan</li> </ul>
<b>Air Minum :</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber air baku kuantitas, kualitas, kontinuitas, keterjangkauan tercapai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas air baku PDAM menurun, karena pencemaran di hulu/lokasi sumber air baku akibat sedimentasi, dan sampah, sehingga air baku yang dapat diolah berkurang. Seperti air sungai dari 1800 liter/detik menjadi 1700 liter/detik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah ke sungai rendah, air limbah domestik rumah tangga yang langsung masuk ke sungai, air limbah industri masih ada di sungai. Lokasi sumber air baku dan industri berada di Kabupaten Bogor</li> </ul>

Perumahan dan Permukiman		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efisiensi energi dalam penyelenggaraan penerangan milik jalan umum</li> <li>• Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau/taman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ...% PJU yang hemat energi</li> <li>• Luas tamah dan jalur hijau baru 40,7 Ha dari 500 ha yang diharapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen yang masih kurang optimal, karena Pendataan untuk perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan taman dan PJU masih rendah</li> </ul>

### Inovasi

- Pembangunan SPBG tambahan
- Sistem kontrol angkutan umum massal dan subsidi
- Sistem control kualitas sungai untuk air baku (tingkat pencemaran)
- Pengelolaan bank sampah dan TPS 3R di tingkat masyarakat
- Sistem kontrol pengelolaan PJU (penggunaan energi, pembangunan, pemeliharaan)
- Sistem kontrol pengelolaan taman

Hasil Diskusi Smart Living dan Smart Society

Tabel 15. Tabel Hasil Diskusi Smart Living dan Smart Society

PERMASALAHAN	PEMECAHAN MASALAH
1. Pelayanan Rumah Sakit → Peserta PBI → Alur Layanan Berbelit	1. SIM Puskesmas (SIMPUS)
2. Perilaku sehat kurang dan kebiasaan sehat	2. Pendaftaran Online
3. Puskesmas dan Rumah Sakit jam pelayanan → DISIPLIN PETUGAS	3. Jadwal Posyandu yang jelas (Layanan, tanggal posyandu, Waktu, dsb)
4. Jangkauan pelayanan puskesmas rawat inap	4. Mengelola laporan pelayanan di posyandu → Kader Posyandu
5. Informasi tentang pelayanan puskesmas (di web, terpampang di puskesmas, dsb) → Display	5. Pmberdayaan masyarakat → Public Partnership
6. Pendistribusian Alkon → Adanya aplikasi atau jejaring antar dinas → Kerjasama dan Komunikasi	6. Pelaporan Luar Gedung/Posyandu online dengan puskesmas
7. Tidak jelasnya informasi / Kurangnya sosialisasi (Pembiayaan,	7. Citizen Culture
	8. Via Whatsapp
	9. Video (advertising) tentang gaya hidup sehat → Pak Walikota lari, bersepeda, dsb

<p>Alur Pelayanan)</p> <p>8. Kapasitas tempat tidur Rumah Sakit (KHUSUSNYA ICU, NICU, PICU)</p> <p>9. Kesenjangan Biaya Jasa dan Alat Kesehatan</p> <p>10. Kebutuhan informasi yang jelas (JADWAL DOKTER, BESARNYA BIAYA)</p> <p>11. Rekam medis puskesmas bisa dibaca Rumah Sakit</p>	<p>10. Sticker2 tentang pesan kesehatan</p> <p>11. Creative Campaign → Komunitas, usia muda/remaja</p> <p>12. Mengemas masakan sehat</p> <p>13. Gerakan sarapan sehat</p> <p>14. Menyusun menu sehat → Lomba</p> <p>15. Sasaran untuk makanan sehat → Ibu-ibu</p> <p>16. Kejasama semua pihak (Ahli Gizi)</p> <p>17. Membuat hal-hal yang shat dibuat sesuatu yang keren</p> <p>18. Bahan makanan→ Urban Farming</p> <p>19. Kunjungan “Chef” ke sekolah2 untuk demo masakan sehat untuk keluarga → Pra sekolah dan SD</p> <p>20. Komunitas ibu-ibu berbagi resep makanan sehat, mudah dan murah</p> <p>21. Informasi komunitas remaja yang peduli kesehatan → Melibatkan komunitas binaan</p> <p>22. Komunitas orang tua → Olahraga, hobi dan berkumpul bersama → Pengembangan Posbindu → Inisiasi dari Kesehatan</p> <p>23. Sumber informasi kesehatan yang lebih jelas → Web Dinkes</p> <p>24. Pemeriksaan kesehatan → Mobcat lebih rutin dan sering → Jadwalnya pasti (Tempat dan Tanggal Pelayanan) → Informasi lebih jelas (Seperti SIM Keliling)</p> <p>25. Pemecahan masalah kesehatan terintegrasi dengan program yang ada</p> <p>26. Branding suatu program → Persami → Amazing Race</p>
--	---